



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim,

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa baratu

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhana WaTa'ala, yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan perwujudan hasil pertanggungjawaban Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan yang memuat hasil kegiatan yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2020 yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020.

LKIP Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah, dan juga dapat digunakan sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta penjelasan atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Besar harapan bahwasanya Laporan Kinerja ini dapat menjadi koreksi atau bahan evaluasi dan menciptakan kinerja yang lebih baik lagi demi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.

Makassar, Februari 2021

Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.
Plt. Kepala,


Junaedi, B. S.Sos, MH

Pangkat Pembina

NIP. 19760601 200604 1 017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Cascading Kinerja	2
1.2.Peta Probis	6
1.3.Kedudukan Tugas dan Fungsi	7
1.4.Susunan Organisasi	8
1.5.Isu isu Strategis	11
1.6. Dukungan SDM, Sarana dan Prasarana Anggaran	11
1.7.Tindak Lanjut Atas LHE SAKIP Tahun 2019	14
1.8.Landasan Hukum	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	19
2.1. Perencanaan Strategis	19
2.1.1. Visi dan Misi	20
2.1.2. Tujuan dan Sasaran	25
2.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan.....	29
2.2. Perjanjian Kinerja	31
2.3. Rencana Tahun Anggaran.....	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	37
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2020	37

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	41
3.2.1. Pengukuran Capaian Sasaran ke-1	41
3.2.2. Pengukuran Capaian Sasaran ke-2	50
3.2.3. Pengukuran Capaian Sasaran ke-3	57
3.2.4. Pengukuran Capaian Sasaran ke-4	61
3.2.5. Pengukuran Capaian Sasaran ke-5	66
3.2.6. Pengukuran Capaian Sasaran ke-6	71
3.3. Realisasi Anggaran	75
BAB IV PENUTUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Gambaran Umum Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 ...	12
Tabel 1.2. Jumlah Aset pada Bappelitbangda Prov Sulsel per 1 September 2020	13
Tabel 1.3. Perbandingan Dukungan Anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2020.....	14
Tabel 2. 1. Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023	22
Tabel 2.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan	26
Tabel 2.3. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan	28
Tabel 2.4. Strategi dan Kebijakan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dalam Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan.....	29
Tabel 2.5. Strategi dan Kebijakan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dalam Renstra Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan ...	30
Tabel 2.7. Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.....	31
Tabel 2.8. Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan tahun Anggaran 2020.....	33
Tabel 2.9. Anggaran Belanja Langsung Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2020 yang Dialokasikan ke Sasaran Strategis.....	35
Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	37
Tabel 3.2. Capaian IKU Bappelitbangda Provinsi Sulsel Tahun 2020.....	38
Tabel 3.4. Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Sulsel Tahun 2019.....	39
Tabel 3.5. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-1	42
Tabel 3.6. Gambaran Target dan Realisasi Program Prioritas Prov Sulawesi Selatan Tahun 2020.....	46
Tabel 3.7. Capaian Anggaran Sasaran ke-1	48
Tabel 3.8. Tingkat Efisiensi Sasaran ke-1	49
Tabel 3.9. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-2	51
Tabel 3.10. Capaian Anggaran Sasaran ke-2	55
Tabel 3.11. Tingkat Efisiensi Sasaran ke-2	56

Tabel 3.12. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-3	57
Tabel 3.13. Integrasi antara Prioritas Nasional dengan Daerah.....	58
Tabel 3.14. Capaian Anggaran Sasaran ke-3	60
Tabel 3.15. Tingkat Efisiensi Sasaran ke-3	61
Tabel 3.16. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-4	62
Tabel 3.17. Konsistensi RKPD dengan RTRWP.....	63
Tabel 3.18. Capaian Anggaran Sasaran ke-4	65
Tabel 3.19. Tingkat Efisiensi Sasaran ke-4	66
Tabel 3.20. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-5	67
Tabel 3.21. Daftar Inovasi Perangkat Daerah Pemprov Sulsel	67
Tabel 3.23. Capaian Anggaran Sasaran ke-5	70
Tabel 3.24. Tingkat Efisiensi Sasaran ke-5	70
Tabel 3.25. Target dan Realisasi Kinerja Sasaran ke-6	71
Tabel 3.26. Capaian Anggaran Sasaran ke-6	73
Tabel 3.27. Tingkat Efisiensi Sasaran ke-6	74
Tabel 3.28. Target Belanja Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan APBD Perubahan Parsial Tahun Anggaran 2020	75
Tabel 3.29. Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Pohon Kinerja RPJMD Terkait Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan	2
Gambar 1.2. Pohon Kinerja Urusan Perencanaan	3
Gambar 1.3. Pohon Kinerja Urusan Urusan Penelitian dan Pengembangan.....	5
Gambar 1.4. Gambaran Peta Proses Bisnis Bappelitbangda Prov. Sulsel	6
Gambar 1.5. Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan Berdasarkan Pergub No. 51 Tahun 2019	10
Gambar 3.1. Prog/Keg RPJMD/RENSTRA, RKPD dan APBD	43
Gambar 3.2. Aplikasi <i>e-planning</i>	44
Gambar 3.3. Aplikasi Simonev	45
Gambar 3.4. Aplikasi Geospasial	64

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja 2020
2. Lembar Asistensi
3. Surat Tindak Lanjut Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019

Bab I :

1. Cascading Kinerja
2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
3. Peta Proses Bisnis
4. Susunan Organisasi
5. Isu-Isu Strategis
6. Dukungan SDM, Sarana Prasarana, dan Anggaran
7. Tindak Lanjut atas LHE Sakip Tahun sebelumnya
8. Landasan Hukum

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan disusun berdasarkan atas dokumen Perencanaan Strategis yang telah ditetapkan dan disepakati sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Tehnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

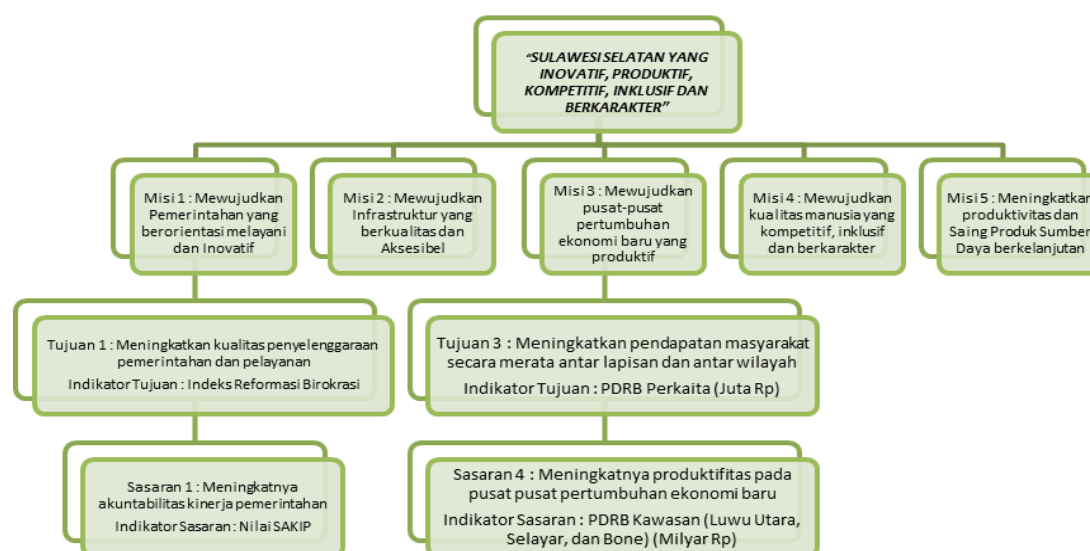
Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maka dokumen Laporan Kinerja ini disusun dengan maksud agar setiap unsur penyelenggaraan negara mempertanggungjawabkan secara akuntabel pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam penggunaan anggaran dan kebijakan yang dimandatkan kepada instansi pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. Di dalam Laporan Kinerja ini terkandung instrumen yang mampu mengukur indikator pertanggungjawaban setiap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja adalah untuk memberikan informasi yang terukur kepada Gubernur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan dari Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sehingga dapat dijadikan acuan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Adapun, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang menyatukan 2 (dua) urusan yaitu urusan perencanaan pembangunan serta urusan penelitian dan pengembangan sehingga terbentuk Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga dalam penyusunan LKIP menggabungkan dua urusan tersebut.

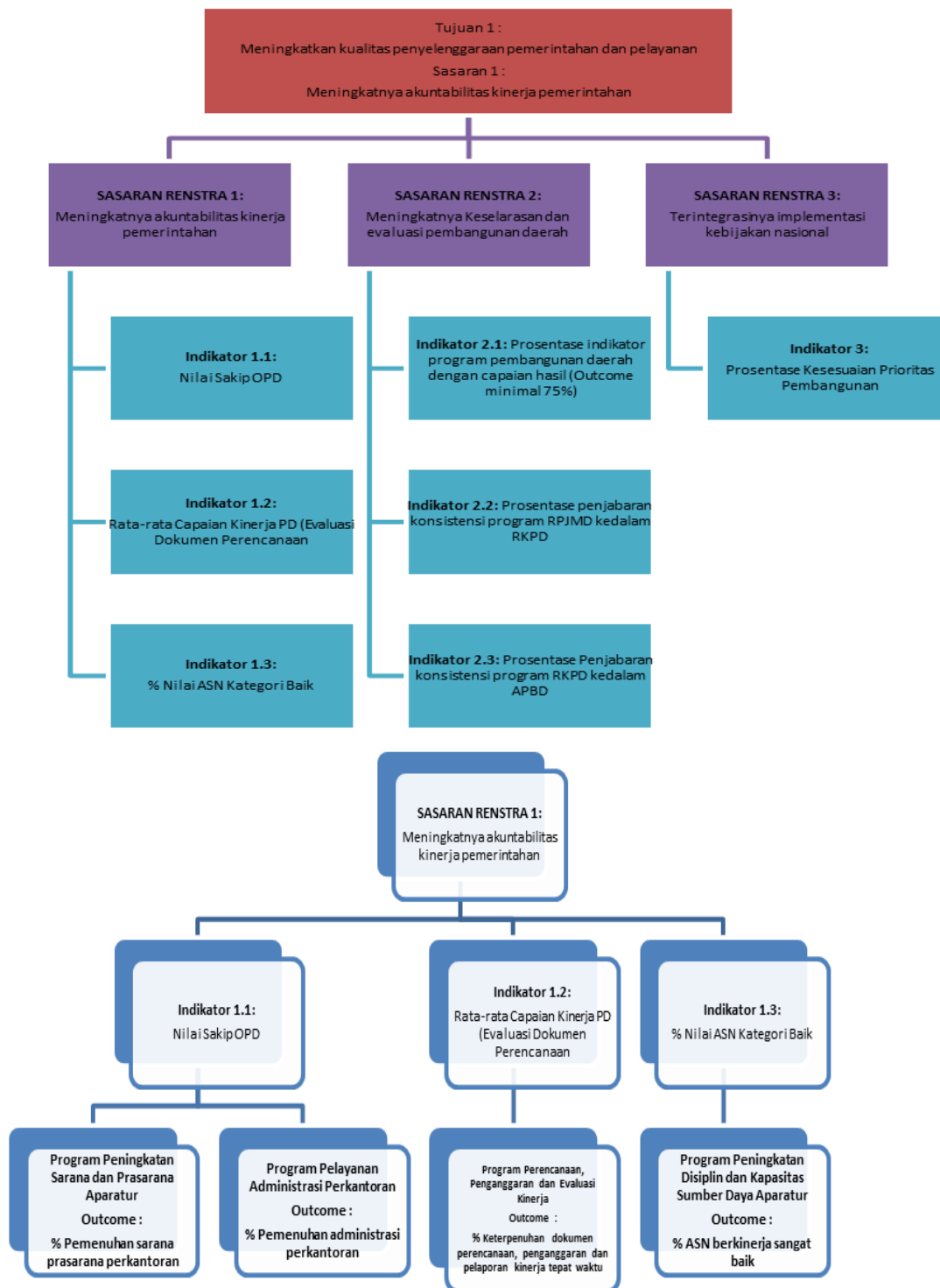
1.1. CASCADING KINERJA

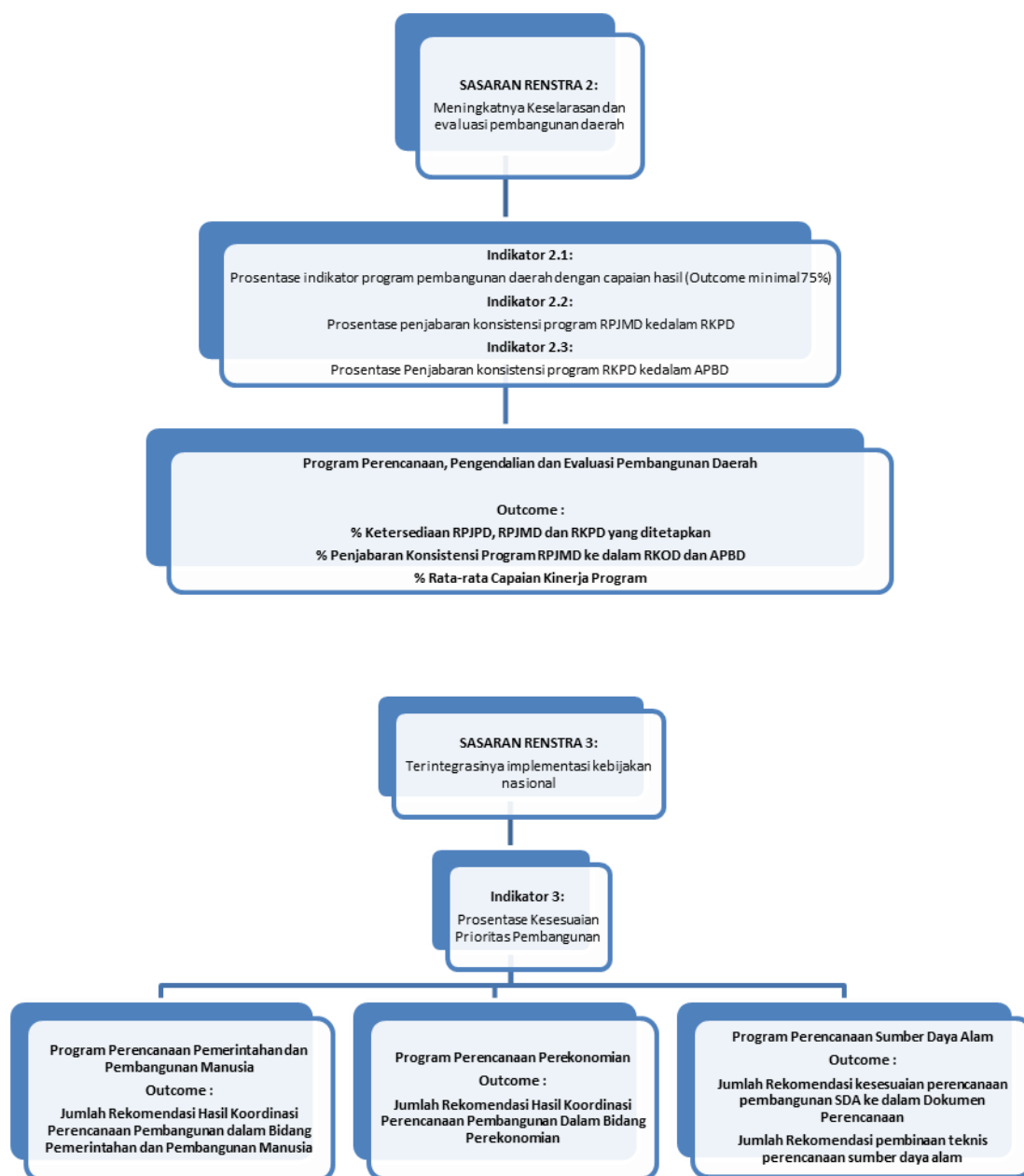
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk agar dapat memberikan dukungan penuh dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Adapun Cascading Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut :

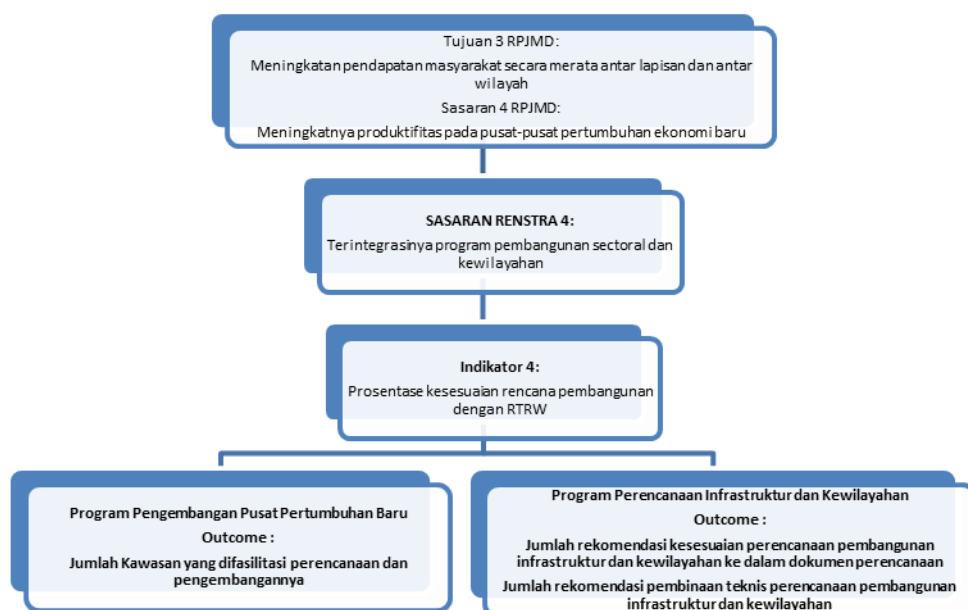
Gambar 1.1 Pohon Kinerja RPJMD terkait Urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan



Gambar 1.2 Pohon Kinerja Urusan Perencanaan







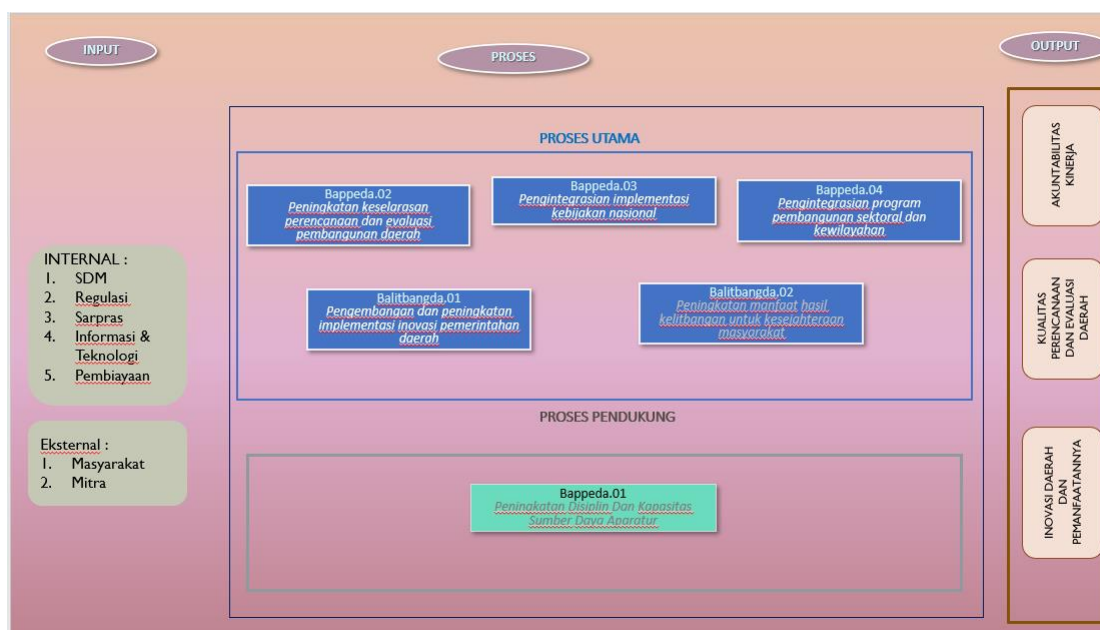
Gambar 1.3 Pohon Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan

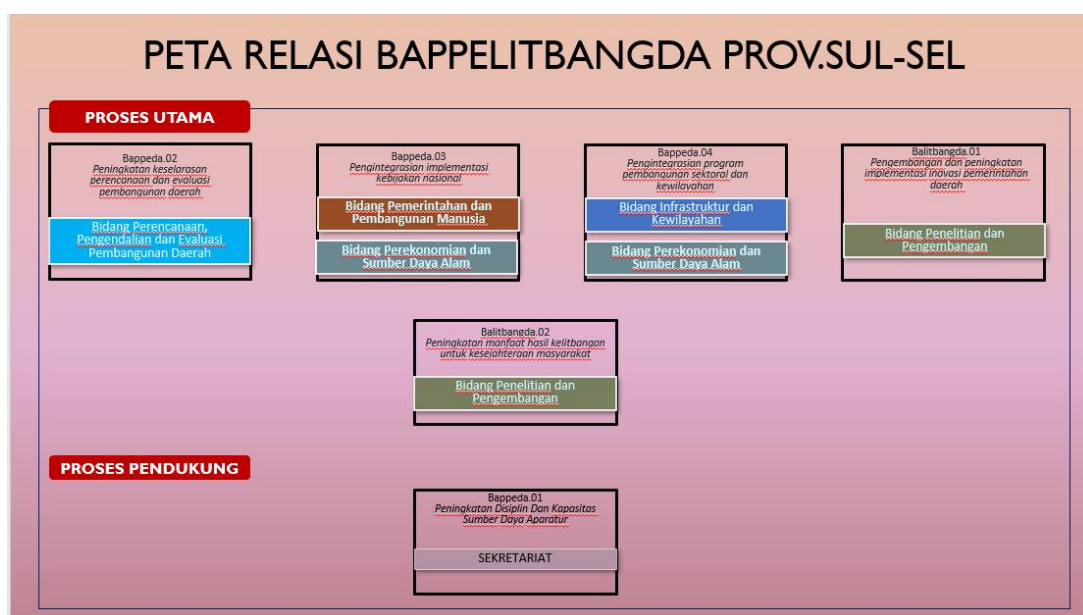


1.2. PETA PROSES BISNIS

Peta Proses bisnis adalah sebuah acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi untuk menghasilkan kinerja. Hal tersebut, sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, maka terkait hal tersebut Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menggambarkan proses bisnisnya sebagai berikut:

Gambar 1.4 Gambaran Peta Proses Bisnis Bappelitbangda Prov. Sulsel





1.3. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sebagai bentuk konsekuensi tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian diuraikan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan diatur kembali dalam Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diteruskan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 51 Tahun 2019 bahwasanya Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2019 mempunyai tugas membantu

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021

Gubernur menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 51 Tahun 2019, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4. SUSUNAN ORGANISASI

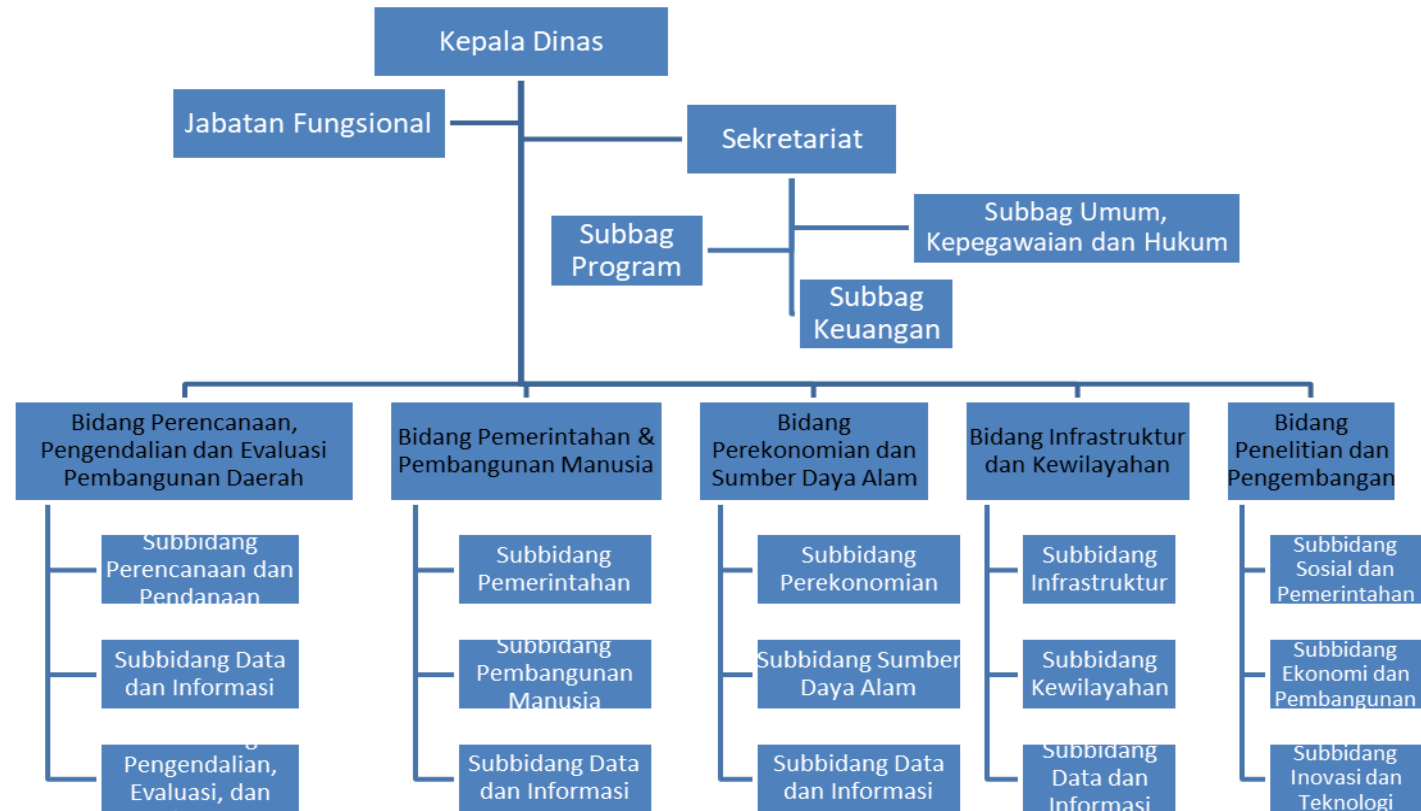
Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan sejak Tahun 1982 yang telah mengalami penyempurnaan sejak diberlakukannya otonomi daerah. Susunan organisasi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021

2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - a. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Subbidang Data dan Informasi;
 - c. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari;
 - a. Subbidang Pemerintahan;
 - b. Subbidang Pembangunan Manusia;
 - c. Subbidang Data dan Informasi.
5. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam. terdiri dari :
 - a. Subbidang Perekonomian;
 - b. Subbidang Sumber Daya Alam;
 - c. Subbidang Data dan Informasi.
6. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari :
 - a. Subbidang Infrastruktur;
 - b. Subbidang Kewilayahan;
 - c. Subbidang Data dan Informasi.
7. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Subbidang Sosial dan Pemerintahan;
 - b. Subbidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. Subbidang Inovasi dan Teknologi
8. Jabatan Fungsional

Gambar 1.5 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Pergub No. 51 Tahun 2019



1.5. ISU ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan di Sulawesi Selatan karena dampaknya yang signifikan di masa depan, dan jika tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian dan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Adapun isu-isu strategis harus dipahami karena diperlukan guna peningkatan efektivitas program dan kegiatan guna menyelesaikan permasalahan pembangunan. Isu-isu strategis tersebut meliputi :

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah guna meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan;
3. Peningkatan kualitas integrasi dan harmonisasi program-program pembangunan antar tingkatan pemerintahan;
4. Peningkatan kualitas pengumpulan, penyajian dan pengamanan data dan informasi guna mengoptimalkan pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah serta pengkajian kewilayahan;
5. Optimalisasi sistem yang berbasis pada teknologi informasi yang terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, pendanaan hingga evaluasi.
6. Optimalisasi pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rekomendasi perumusan kebijakan pemerintah daerah.

1.6. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan kesekretariatan. Pada tahun 2019, jumlah pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebanyak 141 orang Pegawai Negeri sipil yang terdiri dari lihat tabel berikut ini;

Tabel 1.1. Gambaran Umum Pegawai Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2020

GOLONGAN PEGAWAI	PENDIDIKAN UMUM								JML	JENIS KELAMIN		JML	
	SD	SLTP	SLTA	D3	D4	S1	S2	S3		L	P		
Gol. IV	IV/d						1				1		
	IV/c					1	8			1	8		
	IV/b					6	11	2		10	9		
	IV/a					3	31			16	18		
	Sub Total					10	51	2	63	27	36	63	
Gol. III	III/d				1	25	5			15	16		
	III/c					13	13			14	12		
	III/b			1		6	19	2	-	16	12		
	III/a			1		1	16	-	-	11	7		
	Sub Total			2		8	73	20	-	103	56	47	103
Gol. II	II/d			12						8	4		
	II/c			8						7	1		
	II/b			2						2			
	II/a			1							1		
	Sub Total			23					23	17	6	23	
Gol. I	I/d	1								1			
	I/c								1				
	I/b	2								2			
	I/a												
	Sub Total	3							3	3		3	
TOTAL		3	-	25	-	8	83	71	2	192	103	89	192

Sumber : Bagian Umum, Hukum & Kepeg. Bappelitbangda Prov. Sulsel 2020

Daftar pegawai Bappeda diatas sudah termasuk dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, yang tercatat sebagai plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sejak tanggal 9 Juli 2020 berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas oleh Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 821.2/17/VIII/Plt.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dapat berjalan dengan baik, selain dukungan sumber daya aparatur yang terampil juga perlu didukung oleh ketersediaan prasarana dan sarana yang memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan secara berkesinambungan, daya dukung sarana

penunjang operasional tersebut diantaranya adalah peralatan dan perlengkapan perkantoran, sesuai rincian sebagai berikut :

Tabel 1.2 Jumlah Aset pada Bappelitbangda Prov Sulsel per 1 September 2020

a. Urusan Perencanaan

No.	Jenis Aset	Harga
1.	KIB B (Peralatan dan Mesin)	Rp. 14.011.211.155,-
2.	KIB C (Gedung dan Bangunan)	Rp. 6.102.667.000,-
3.	KIB D (Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan)	Rp. 803.490.000,-
4.	KIB E (Aset Tetap Lainnya)	Rp. 1.329.397.850,-
5.	Kartu Inventaris Barang Aset Tak Berwujud	Rp. 1.001.237.000

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Prov. Sulsel Tahun 2020

b. Urusan Penelitian dan Pengembangan

No.	Jenis Aset	Harga
1.	KIB A (Tanah)	Rp. 20.134.597.040,-
2.	KIB B (Peralatan dan Mesin)	Rp. 5.034.766.054,-
3.	KIB C (Gedung dan Bangunan)	Rp. 5.347.403.648,-
4.	KIB D (Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan)	Rp. 540.509.700,-
5.	Kartu Inventaris Barang Aset Tak Berwujud	Rp. 277.265.000,-

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Prov. Sulsel Tahun 2020

Adapun untuk KIB D yaitu berupa jaringan e-planning, simonev dan lain-lain yang dikelola oleh Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Secara umum sarana dan prasarana yang dimiliki mampu untuk mendukung kelancaran dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 1.3 Perbandingan Dukungan Anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2020

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Belanja Langsung	Jumlah
2019	Rp. 21.043.512.774,-	Rp. 27.266.076.000,-	Rp. 48.309.588.774,-
2020	Rp. 31.549.864.363,-	Rp. 35.741.684.090,-	Rp. 67.291.548.453,-

Sumber : Bappelitbangda 2020

Anggaran belanja total pada tahun 2019 sebesar Rp. 48.309.588.774,- dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 67.291.548.453,-, dimana terdapat kenaikan sebesar Rp.18.981.959.679,-. Pada belanja langsung dan tidak langsung terdapat kenaikan yang cukup besar dikarenakan terjadinya penggabungan dua urusan yaitu urusan Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan, dimana Bappeda dan Balitbangda di gabung menjadi 1 (satu) Badan.

1.7. TINDAK LANJUT ATAS LHE SAKIP TAHUN 2019

No	Catatan Evaluasi	Tindak Lanjut
Surat Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 700.04/5264/A.1/Itidprov tanggal 19 Juni 2020		
a.	Tujuan yang termuat dalam Renstra 2018 – 2023 tidak disertai indikator target keberhasilan Rekomendasi : Merumuskan dan menetapkan indikator tujuan yang termuat dalam Renstra 2018-2023	Rumusan indikator tujuan telah termuat dalam Renstra 2018-2023
b.	Masih terdapat beberapa indikator program dan kegiatan yang ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) belum memenuhi kriteria keberhasilan yang baik	Dalam Perumusan Renstra Perubahan Bappelitbangda Tahun 2018-2023 akan lebih memperhatikan dalam penentuan seluruh ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) dari program dan

No	Catatan Evaluasi	Tindak Lanjut
	Rekomendasi : Merumuskan dan menetapkan indikator program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra 2018-2023	kegiatan agar seluruhnya dapat memenuhi kriteria keberhasilan yang baik.
c.	Merumuskan IKU berdasarkan perubahan atas kelembagaan Rekomendasi : Merumuskan dan menetapkan IKU berdasarkan perubahan kelembagaan Bappelitbangda dengan mengakomodir urusan Balitbangda	IKU BAPPELITBANGDA tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan mengakomodir urusan perencanaan dan litbang.
d.	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i> Rekomendasi : Memanfaatkan hasil pengukuran sebagai dasar pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> .	Akan berupaya untuk memanfaatkan pengukuran capaian kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> .
e.	Rencana Aksi Tahun 2020 belum disusun dengan mengurai target kinerja berupa aksi yang akan dilaksanakan Perlu penyampaian rencana aksi dengan menetapkan aksi yang akan dilaksanakan	Rencana Aksi Tahun 2020 telah disusun dengan mengikutsertakan aksi yang akan dilaksanakan dan penentuan target waktu pelaksanaan.
f.	Belum terdapat pengukuran atas	Realisasi Rencana Aksi Triwulan I telah

No	Catatan Evaluasi	Tindak Lanjut
	<p>realisasi rencana aksi tahun 2020 untuk triwulan I</p> <p>Rekomendasi : Menyusun realisasi rencana aksi tahun 2020 untuk triwulan I</p>	tersusun dan disahkan.
g.	<p>Laporan Kinerja Tahun 2019 khususnya pada Bab III Akuntabilitas Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi serta upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk pencapaian target kinerja ke depan</p> <p>Rekomendasi : Melengkapi LKIP 2019 khususnya Bab III terkait dengan teknis permasalahan yang dihadapi dan upaya perbaikannya serta upaya yang akan dilakukan untuk pencapaian target kinerja dimasa akan datang</p>	LKIP Bappeda, pada Bab III telah memasukan permasalahan teknis yang dihadapi dengan lebih mendalam dan memberikan solusi/ upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian target kinerja dimasa yang akan datang.
h.	<p>Informasi kinerja yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan</p> <p>Rekomendasi : Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja dalam perbaikan perencanaan ke depan</p>	Hasil evaluasi kinerja dimanfaatkan sebagai upaya dalam perbaikan perencanaan ke depan.
i.	Berdasarkan pengukuran kinerja atas capaian kinerja tahun 2019 masih terdapat capaian kinerja output	Akan lebih meningkatkan evaluasi dalam pencapaian kinerja output kegiatan yang belum tercapai dari target

No	Catatan Evaluasi	Tindak Lanjut
	<p>kegiatan yang belum memenuhi target dari yang ditetapkan.</p> <p>Rekomendasi : Melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja output kegiatan yang belum tercapai dari target yang telah ditetapkan.</p>	yang telah ditetapkan.

1.8. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Selatan dilakukan dengan tetap mengacu pada :

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

Bab II berisi
2.1 Perencanaan Strategis
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020
2.3. Rencana Tahun Anggaran 2020

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Tahun 2020, merupakan tahun perubahan bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dimana salah satunya terjadi perubahan Nomenklatur Perangkat Daerah yang mengakibatkan berubahnya struktur Organisasi yang terdapat di Perangkat Daerah. Dimana salah satunya, Perangkat Daerah yang mendapatkan perubahan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang digabung menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun kondisi saat ini Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih dalam tahap proses merampungkan RPJMD Perubahan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 yang berbanding lurus dengan Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Terkait hal tersebut, maka Penyusunan Perjanjian Kinerja Bappelitbangda masih berdasarkan Renstra Bappeda dan Renstra Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan memasuka hasil *coaching clinic* yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pada tanggal 26 – 27 Oktober 2020 di Hotel Four Point, Makassar.

Sebagaimana yang dijelaskan diatas dan telah tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Sulawesi Selatan Tahun 2019, Nomor 1), bahwasanya RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Selatan selama lima tahun. Adapun Renstra sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Bappeda dan Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkelanjutan. Berdasarkan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Renstra Bappeda dan

Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023.

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan Misi Gubernur Sulawesi Selatan yang sebagaimana telah tertuang adalah RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023, visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2023 adalah :

“SULAWESI SELATAN YANG INOVATIF, PRODUKTIF, KOMPETITIF, INKLUSIF DAN BERKARAKTER”

Penjabaran makna dari Visi Sulawesi Selatan di atas adalah sbb:

Inovatif adalah kondisi pemerintah yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”

Kompetitif adalah kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) yang dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas”

Produktif adalah kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “mandiri dan sejahtera”.

Inklusif adalah kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi”.

Berkarakter adalah kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter”.

Adapun untuk mewujudkan visi tersebut maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi yaitu sebagai berikut :

- Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif.;

- Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel;
- Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif;
- Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter;
- Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Tabel 2.1

Ringkasan Visi Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Visi : Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif	1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan		Indeks Reformasi Birokrasi
			1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Nilai SAKIP
			2. Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Publik
2.	Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel	2. Meningkatkan infrastruktur wilayah		Pertumbuhan PDRB Sektor Usaha, Transportasi dan Pergudangan,

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Konstruksi dan Pengadaan Air
			3. Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur.	Indeks Aksesibilitas infrastruktur
3.	Mewujudkan Pusat-pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif	3. Meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata antar lapisan dan antar wilayah	4. Meningkatnya produktivitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru	PDRB Perkapita (Juta Rp)
				Angka Kemiskinan (%)
				PDRB Kawasan (Luwu Utara, Selayar dan Bone)(Milyar Rp)
				Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
			5. Menurunnya kesenjangan antar lapisan	Indeks Gini

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				Indeks Masyarakat dan antar wilayah
4.	Mewujudkan kualitas Manusia yang kompetitif, Inklusif, dan berkarakter	4. Meningkatkan SDM secara inklusif	6. Meningkatnya derajat Pendidikan masyarakat	IPM Indeks Pendidikan
			7. Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan	IPG
			8. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan
5.	Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang berkelanjutan	5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup		Pertumbuhan PDRB (%)
			9. Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumber daya alam	Produktivitas Total Daerah (Rp/ Angkatn Kerja)
			10. Terpeliharanya kualitas	Indeks Kualitas

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.	Lingkungan Hidup (IKLH)
				Potensi Penurunan Emisi GRK (Juta Ton Co2Eq)

Sumber : RPJMD Prov. Sulsel Tahun 2018 - 2023

Melihat dari tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Bappeda mendukung pada 2 tujuan dengan sasarnya yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintahan dan Meningkatnya produktivitas pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan serta mempertimbangkan nilai-nilai dan faktor-faktor kunci keberhasilan maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, yang dimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda dan Balitbangda Tahun 2018- 2023. Adapun tujuan dan sasaran Bappelitbangda dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)
1.	Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja PD (Evaluasi dokumen perencanaan)	100%	100%	100 %	100%	100%
			Nilai SAKIP OPD	80%	80%	85%	90%	90%
			% ASN Nilai SKP Kategori Baik	100%	100%	100 %	100%	100%
			% Temuan Material	-	0,06%	0,06 %	0,06%	0,05 %
2.	Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan bersinergi	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Prosentase Penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100 %	100%	100%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)
			Prosentase Penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	100%	100%	100 %	100%	100%
			Prosentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) minimal 75%	92	92%	92,5 %	92,5%	93%
		Terintegrasinya implementasi kebijakan nasional	Prosentase Kesesuaian prioritas pembangunan	100%	100%	100 %	100%	100%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)
2.	Meningkatkan sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah	Terintegrasinya program pembangunan sektoral dan kewilayahan	Prosentase Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100%	100%	100 %	100%	100%

Sumber : Renstra Bappeda Prov. Sulsel Tahun 2018 - 2023

Tabel 2.3

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan penguatan inovasi daerah melalui pengembangan dan implementasi inovasi pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengembangan dan implementasi inovasi pemerintah daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi Daerah	20%	20%	20%	20%	20%

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)
2.	Merumuskan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemanfaatan hasil kelitbangan untuk kesejahteraan masyarakat	Tersedianya bahan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemanfaatannya hasil kelitbangan untuk kesejahteraan masyarakat	Jumlah kebijakan hasil kelitbangan dan pemanfaatan iptek daerah	9 Reko mend asi	9 Reko mend asi	9 Reko mend asi	9 Reko mend asi	9 Reko mend asi

Sumber : Renstra Balitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018 - 2023

2. 1. 3. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan Bappelitbangda merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh Bappelitbangda Sulawesi Selatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam lima tahun mendatang. Adapun strategi dan kebijakan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang tertuang dalam Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan dan Renstra Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dapat dijabarkan dalam **tabel 2.4 dan tabel 2.5** sebagai berikut:

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah dan sumber daya manusia 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapabilitas, kelembagaan, koordinasi, dan kompetensi Sumber Daya Manusia
2.	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi kesesuaian prioritas pembangunan RKPD dengan prioritas pembangunan RPJMD Optimalisasi kesesuaian target program Renstra OPD dengan target Program RPJMD Optimalisasi kesesuaian target program Renja OPD dengan target Program RKPD Optimalisasi Implementasi rencana pola dan rencana struktur dalam rencana pembangunan Meningkatkan hasil evaluasi pelaksanaan program-program pembangunan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan verifikasi prioritas RKPD terhadap Prioritas RPJMD melalui <i>e-planning</i> Peningkatan verifikasi Renstra OPD terhadap target Program RPJMD melalui <i>e-planning</i> Peningkatan verifikasi Renja OPD terhadap target Program RKPD melalui <i>e-planning</i> Peningkatan peran dan fungsi forum penataan ruang daerah melalui <i>e-planning</i> Peningkatan Monitoring Hasil Evaluasi program-program pembangunan daerah melalui <i>simonev</i>

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Terintegrasinya implementasi kebijakan nasional	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan seluruh stakeholder terkait 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan koordinasi komunikasi dengan Pusat, stakeholder terkait
4.	Terintegrasinya program pembangunan sektoral dan kewilayahan	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi Implementasi rencana pola dan rencana struktur dalam rencana pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan peran dan fungsi forum penataan ruang daerah melalui <i>e-planning</i>

Sumber : Renstra Bappeda Prov. Sulsel Tahun 2018 – 2023

NO	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
(1)	(2)	(3)	(4)
5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengembangan dan implementasi inovasi pemerintahan daerah	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan fungsi dan peran Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Lembaga yang melaksanakan fungsi Kelitbangan dan Inovasi dengan mengoptimalkan peran Lembaga-lembaga pendukung kelitbangan 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan public, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peran peningkatan daya saing daerah
6.	Tersedianya bahan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan termanfaatkannya hasil kelitbangan untuk kesejahteraan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Membangun koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas kelitbangan serta peningkatan kerjasama antara Lembaga litbang baik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Hilirisasi hasil kelitbangan khususnya komoditi unggulan untuk kesejahteraan masyarakat

Sumber : Renstra Balitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018 – 2023

2. 2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja ini merupakan dokumen penetapan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi. Dalam dokumen perjanjian kinerja ini juga memuat a) sasaran strategis, b) Indikator kinerja utama organisasi, dan c) target kinerja dan anggaran.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun berdasarkan Surat Keputusan Kepala Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 188.4/975.1/Bappelitbangda tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

Tabel 2.7
Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2018-2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Prosentase penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	Persen	$\frac{\text{Jmlh Program RKPD thn berkenan}}{\text{Jmlh prog RPJMD yang harus dilaksanakan Tahun berkenan}} \times 100\%$	Bappelitbangda Prov. Sulsel
	Prosentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	Persen	$\frac{\text{Jmlh program APBD thn berkenan}}{\text{Jumlah Prog RKPD yang harus dilaksanakan Tahun berkenan}} \times 100\%$	Bappelitbangda Prov. Sulsel

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
	Prosentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (<i>Outcome</i>) minimal 75%	Persen	<u>Jmlh Indikator program yang mencapai 75%</u> x 100% Jumlah Indikator Program	Bappelitbangda Prov. Sulsel
Terintegrasinya implementasi kebijakan nasional	Prosentase kesesuaian prioritas pembangunan	Persen	<u>Prioritas pembangunan Daerah</u> x 100% prioritas pembangunan nasional	Bappelitbangda Prov. Sulsel
Terintegrasinya program pembangunan sektoral dan kewilayahan	Prosentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Persen	<u>Arahan lokasi program pembangunan Tahun 2019</u> x 100% Arahan lokasi pemanfaatan ruang pada RTRWP	Bappelitbangda Prov. Sulsel
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengembangan dan implementasi inovasi pemerintahan	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi daerah	Persen	<u>Jumlah dan Jenis inovasi penyelenggaraan pemerintahan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah</u> x 100% Jumlah Perangkat Daerah	Bappelitbangda Prov. Sulsel

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PENGUKURAN	SUMBER DATA
daerah				
Tersedianya bahan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan termanfaatkannya hasil kelitbangan untuk kesejahteraan masyarakat	Jumlah kebijakan hasil kelitbangan dan pemanfaatan iptek daerah	Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Kelitbangan yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan	Bappelitbangda Prov. Sulsel

Sumber : SK IKU Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2018 - 2023

Perjanjian kinerja, dan rencana kinerja tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020 dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Bappelitbangda provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan daerah yang berkualitas dan bersinergi	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	% penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100%
			% penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	100%
			% Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (<i>outcome</i>) minimal 75%	92%
		Terintegrasinya implementasi kebijakan	% kesesuaian prioritas pembangunan	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
		nasional		
2.	Meningkatkan sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar sector dan antar wilayah	Terintegrasinya program pembangunan sektoral dan kewilayahan	Prosentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100%
3.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengembangan dan implementasi inovasi pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengembangan dan implementasi inovasi pemerintahan daerah	% Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi daerah	20%
4.	Merumuskan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemanfaatan hasil kelitbangan untuk kesejahteraan masyarakat	Tersedianya bahan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemanfaatannya hasil kelitbangan untuk kesejahteraan masyarakat	Jumlah kebijakan hasil kelitbangan dan pemanfaatan iptek daerah	9 rekomendasi
5.	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (evaluasi Dokumen Perencanaan)	94%
			Nilai SAKIP OPD	80%
			% Nilai ASN Kategori Baik	100%
			% Temuan Material	0,06%

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020 Bappelitbangda Prov. Sulsel

2. 3. Rencana Tahun Anggaran 2020

Pada Tahun Anggaran 2020, Bappelitbangda Provinsi melaksanakan kegiatan dengan Pagu Anggaran yang bersumber dari APBD sebesar Rp. 50.784.256.469,30 dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 22.235.640.719,30 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 28.548.615.750,-. Kemudian melalui mekanisme APBD

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2021

Perubahan secara Parsial Tahun 2020 menjadi sebesar Rp.67.291.548.453,- dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. Rp. 31.549.864.363,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 35.741.684.090,-.

Anggaran belanja langsung Bappelitbangda Prov. Sulawesi Selatan Tahun 2020 yang dialokasikan ke sasaran Strategis adalah tercantum dalam **tabel 2.9** sebagai berikut :

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1.	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah.	Rp.8.779.439.223,-	25%	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.	Rp. 12.536.515.608,-	35%	Program-program di Sekretariat
3.	Terintegrasinya implementasi kebijakan nasional.	Rp. 3.591.355.546,-	10%	Program Perencanaan Pemerintah dan Pembangunan Manusia, Program Perencanaan Perekonomian, Program Pengembangan Sumber Daya Alam
4.	Terintegrasinya program pembangunan sektoral dan kewilayahan.	Rp. 7.067.355.546,-	20%	Program Infrastruktur dan Kewilayahan, Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru
5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan	Rp. 871.730.142,-	2%	Program Pengembangan

No.	Sasaran	Anggaran	Prosentase	Keterangan
	pemerintahan daerah melalui pengembangan dan implementasi inovasi pemerintahan daerah			dan Implementasi Inovasi Pemerintahan
6.	Tersedianya bahan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan termanfaatkannya hasil kelitbangan untuk kesejahteraan masyarakat	Rp.2.894.818.300	8%	Program Kelitbangan dan Pemanfaatan IPTEK
	JUMLAH	Rp. 35.741.684.090,-	100%	Bappelitbangda

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2020

Bab III berisi
3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020
3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis
3.3. Realisasi Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020

Akuntabilitas Kinerja merupakan pengukuran tingkat capaian kinerja yang dapat diperoleh berdasarkan perbandingan antara target dengan realisasi yang berhasil dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berjalan.

Adapun capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2020 didapatkan dengan membandingkan Realisasi yang dicapai dengan target sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Bappeda dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Perhitungan Capaian Kinerja didapat dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Presentase Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target Rencana}} \times 100 \%$$

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja seperti yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang dijelaskan pada tabel 3-1.berikut:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dikarenakan penggabungan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka terdapat beberapa **penambahan** indikator sasaran Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 dengan indicator sasaran Tahun 2019, sehingga terdapat beberapa kinerja antara tahun 2019 dan 2020 yang tidak dapat dibandingkan.

Tahun 2020 merupakan tahun kedua dalam perencanaan jangka menengah dengan sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 telah tertuang dalam Renstra Bappeda 2019-2023 yang mendukung visi dan misi Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai implemantasi dari **Keputusan Kepala Badan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 188.4/975.1/Bappelitbangda tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan**, maka hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 menunjukkan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian IKU Bappelitbangda Provinsi Sulsel Tahun 2020

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Meningkatnya keselarasan dan evaluasi pembangunan daerah	Prosentase penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100
		Prosentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	%	100	96	96
		Prosentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) 75%	%	92	90	98
2	Terintegrasinya implementasi kebijakan nasional	Prosentase kesesuaian prioritas pembnaganan	%	100	100	100
3	Terintegrasinya program pembangunan sectoral dan kewilayahan	Prosentase kesesuaian perencanaan pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100
4.	Meningkatnya kualitas penyelenggara	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi	%	20	28	140

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
	an pemerintahan daerah melalui pengembangan dan implementasi inovasi pemerintahan daerah	daerah				
	Tersedianya bahan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan termanfaatkannya hasil kelitbangannya untuk kesejahteraan masyarakat	Jumlah kebijakan hasil kelitbangannya dan pemanfaatan iptek daerah	Rekomendasi	9	10	111

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel 2020

Adapun sasaran, indikator dan capaian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan diuraikan dalam tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Bappelitbangda Provinsi Sulsel Tahun 2020

N O.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KODE
1	Meningkatnya keselarasan dan evaluasi pembangunan daerah	Prosentase penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	%	100	100	100	SANGAT TINGGI
		Prosentase penjabaran konsistensi program RKPd kedalam APBD	%	100	96	96	SANGAT TINGGI
		Prosentase	%	92	90	98	SANGAT

N O.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KODE
		Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (Outcome) 75%					<i>TINGGI</i>
2	Terintegrasi ya implementasi kebijakan nasional	Prosentase kesesuaian prioritas pembangunan	%	100	100	100	<i>SANGAT TINGGI</i>
3	Terintegrasi ya program pembangunan sectoral dan kewilayahan	Prosentase kesesuaian perencanaan pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	<i>SANGAT TINGGI</i>
4	Meningkatny a kualitas penyelenggar aan pemerintahan daerah melalui pengembang an dan implementasi inovasi pemerintahan daerah	% Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi daerah	%	20	28	140	<i>SANGAT TINGGI</i>
5.	Tersedianya bahan perumusan kebijakan hasil kelitbangan dan pemanfaatan Iptek Daerah	Jumlah kebijakan kelitbangan dan pemanfaatan Iptek Daerah	Rekomen dasi	9	10	111	<i>SANGAT TINGGI</i>
6.	Meningkatny a Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	%	94	99,1	101%	<i>SANGAT TINGGI</i>
		Nilai SAKIP	%	80	80	100%	<i>SANGAT TINGGI</i>

N O.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KODE
		% ASN Nilai SKP Kategori Baik	%	100	100	100%	SANGAT TINGGI
		% Temuan Material	%	0,06	0,06	100%	SANGAT TINGGI

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel 2020

Bappelitbangda memiliki 11 (sebelas) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian 6 (enam) sasaran strategis Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2020, persentase capaian sebesar 104,18% dengan 2 indikator yang tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Selanjutnya hasil pengukuran dijabarkan sesuai dengan analisa pelaksanaan program dan kegiatan pendukung pencapaian realisasi masing-masing indikator. Berikut merupakan uraian sasaran strategis beserta Indikator-Indikator Kinerja Bappelitbangda Tahun 2020 :

3.2.1. Pengukuran Capaian Sasaran ke – 1

Telah disebutkan diatas bahwasanya sasaran ke -1 mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja. Sasaran ke – 1 ini menjadi sasaran yang berfokus pada Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan dan Kerjasama Wilayah. Sasaran ke 1, dengan indikatornya adalah sebagai berikut :

Sasaran	: Meningkatkan keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
Indikator	: 1. Prosentase penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD 2. Prosentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD 3. Prosentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (Outcome) minimal 75%

Target dan realisasi kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5 Target dan realisasi kinerja sasaran ke-1

No	Indikator	Baseline 2020	2020			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2023 (%)
			Target %	Realisasi %	Capaian %		
1.	Prosentase penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPD	100%	100	100	$(100/100) \times 100\% = 100\%$	100	100
2.	Prosentase penjabaran konsistensi program RKPD kedalam APBD	100%	100	96	$(96/100) \times 100\% = 96\%$	100	96%
3.	Prosentase indikator program pembangunan daerah dengan tingkat capaian hasil (<i>Outcome</i>) minimal 75%	101,1%	92	90	$(90/92) \times 100\% = 98\%$	100	98%
Rata-Rata Capaian Kinerja					98%		

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2020

❖ Penjelasan Target, realisasi dan Capaian Indikator Sasaran

- Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran ke-1 dengan indikator kinerja sasaran yaitu **persentase program RPJMD yang diakomodir dalam RKPD sebesar 100%**.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 terdapat **464 (empat ratus enam puluh empat) Program** dan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 terdapat **464 (empat ratus enam puluh empat) Program**. Hal tersebut juga dapat dilihat Laporan hasil evaluasi RKPD Provinsi

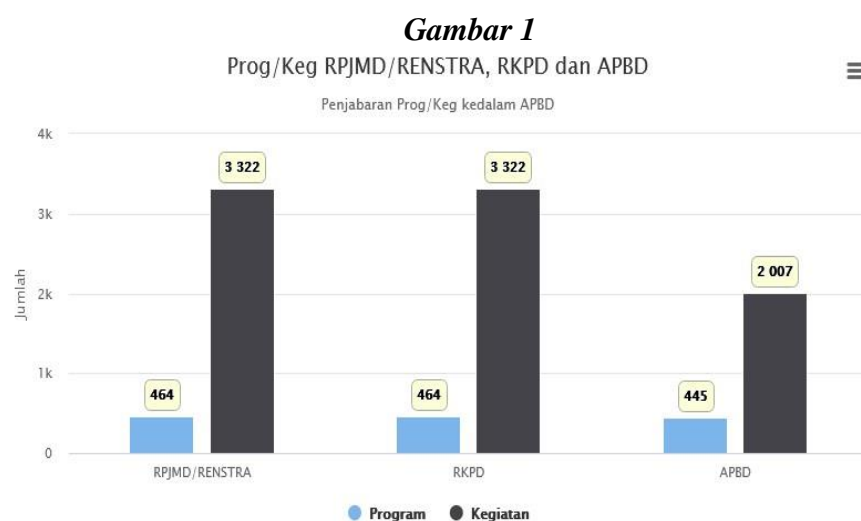
Sulawesi Selatan Tahun 2020 dan juga pada <https://e-planning.sulselprov.go.id/rkpd/contents/admin/#/beranda>.

- Tabel 3.5 menunjukkan realisasi kinerja sasaran ke-1 dengan indikator kinerja sasaran yaitu **persentase program RKPD yang diakomodir dalam APBD** sebesar 96%.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 terdapat **464 (empat ratus enam puluh empat) Program** dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Tahun 2020 terdapat **445 (empat ratus empat puluh lima) Program**. Hal tersebut juga dapat dilihat pada <https://e-planning.sulselprov.go.id/ppas/contents/admin/#/beranda>.

Adapun capaian kinerja sasaran ke-1, indikator ke-2 mengalami penurunan sebesar 4% jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan terjadinya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah yang dimana terjadinya banyak penggabungan Perangkat Daerah, sehingga mengakibatkan beberapa program rutin yang dimiliki oleh Perangkat Daerah yang tergabung menjadi tidak terpakai.

Adapun gambaran dari 2 indikator pada sasaran ke-1 ini adalah sebagai berikut :



Sumber : <https://eplanning.sulselprov.go.id>

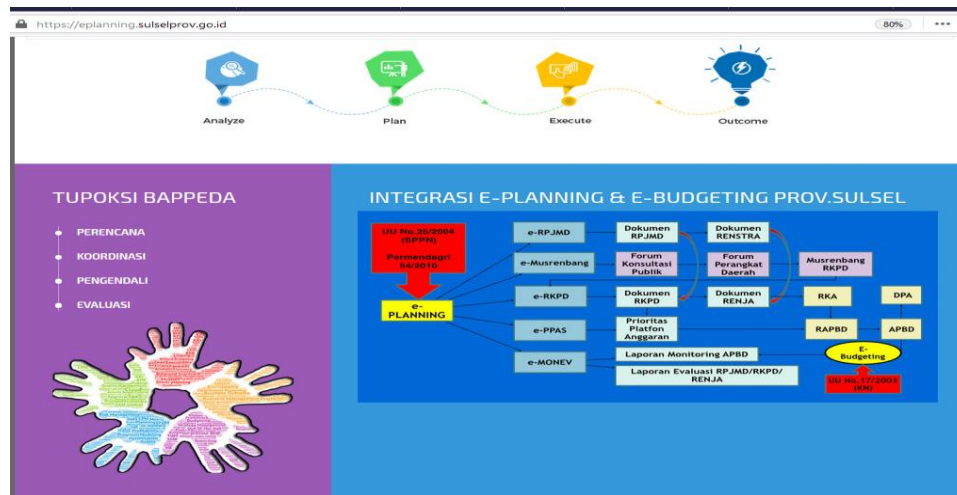
- Adapun dalam rangka menunjang dan monitoring pencapaian kinerja ini didukung oleh beberapa instrument teknologi informasi diantaranya adalah :

1. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning)

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (<https://eplanning.sulselprov.go.id/>) berfungsi sebagai sistem pendukung perencanaan pembangunan daerah. Dalam proses perencanaan di Sulawesi Selatan, Sistem ini telah terintegrasi dengan beberapa sistem anggaran, asset, laporan dan evaluasi. Keberadaan Sistem Informasi Perencanaan sampai dengan saat ini telah mampu mendukung sistem perencanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih baik, sejak penyusunan RPJMD sampai dengan KUA PPAS. Aplikasi ini pun selalu mengalami pengembangan dari tahun ke tahun, yang berdampak kepada kualitas perencanaan pembangunan di Sulawesi Selatan yang mengalami peningkatan.

Gambar 2 Aplikasi e-planning





2. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi (SIMONEV)

Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan yang terdiri dari e-monev APBD, Penilaian Kinerja dengan alamat akses <https://eplanning.sulselprov.go.id/monev> yang terintegrasi dengan E-Sakip. Sistem informasi monev dikembangkan untuk mempermudah OPD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerjanya. Sistem ini sangat mendukung dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Gambar 3 Aplikasi Simonev

Rang	Nama OPD	%	Belanja Langsung		Capaian Realisasi s/d Bulan ini		Sisa Dana/Belum dicairkan s/d Bulan ini			
			(Rp)	(%)	(Rp)	(%)				
1	Biro Hukum	100.00	1.914.049.191.00	1.906.174.536.00	99.69	99.74	1.906.174.536.00	99.69	99.74	5.874.655.00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100.00	7.717.668.501.00	7.523.468.804.00	97.48	100.00	12.268.402.952.00	96.49	100.00	446.030.229.00
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	100.00	25.129.868.429.11	23.940.117.854.50	95.27	89.37	107.337.497.435.50	96.49	97.60	3.907.360.797.70
4	Badan Pendapatan Daerah	100.00	51.619.341.321.00	48.086.826.780.00	89.27	96.49	165.305.130.182.00	95.63	99.55	7.551.441.739.00
5	Dinas Sosial	95.53	8.596.063.437.50	7.855.923.618.00	92.36	100.00	41.572.821.335.00	94.92	96.40	2.227.108.590.30
6	Dinas Perdagangan	100.00	6.770.565.809.00	6.357.136.887.00	93.89	100.00	15.325.560.041.00	94.60	100.00	860.260.921.00
7	Dinas Pendidikan	100.00	854.021.331.599.80	779.629.733.261.00	91.29	73.38	2.553.478.297.039.00	94.60	91.58	143.797.059.999.90
8	Satuan Polisi Pamong Praja	99.20	19.189.619.100.00	18.527.750.332.00	96.55	98.77	36.656.101.488.00	94.54	98.99	2.127.799.877.00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100.00	2.137.053.254.32	2.127.774.454.00	99.57	100.00	8.183.476.696.00	94.01	100.00	578.304.432.21
10	Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD)	83.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4.109.550.376.252.00	63.68	93.80	277.201.644.750.71
11	Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup	100.00	5.732.428.610.00	5.281.403.367.00	92.14	99.91	17.364.633.364.00	93.65	99.97	1.178.373.970.00
12	Biro Umum	95.65	136.555.738.404.82	134.896.103.295.55	97.46	96.42	156.479.320.101.55	92.94	96.14	14.971.266.676.44
13	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	97.50	25.741.884.090.00	32.428.978.439.00	90.73	95.75	62.479.289.073.00	92.76	96.57	4.872.259.335.20
14	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	95.82	6.188.630.164.00	5.288.924.208.00	85.46	100.00	30.537.683.246.00	92.64	96.60	2.418.793.335.20
15	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100.00	6.851.424.026.00	5.838.320.499.58	85.21	100.00	23.906.523.871.58	92.39	100.00	1.969.603.102.42
16	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	100.00	4.074.622.624.37	3.467.839.377.00	85.11	100.00	18.286.255.712.00	92.22	100.00	1.542.454.299.17

- ❖ Data hasil evaluasi kinerja sasaran ke-1, indikator 3, dengan indikator kinerja Prosentase indikator **program pembangunan daerah dengan hasil tingkat capaian hasil (outcome) minimal 75%** sampai dengan **akhir Januari** sebesar 90%. Jika dibandingkan kinerja yang ingin dicapai sebesar 92%, maka capaian ini rendah. Terdapat 101 (seratus satu) Program Prioritas yang capaian hasilnya mencapai minimal 75% dari 112 (seratus dua belas) program prioritas. Hal tersebut dikarenakan terjadinya *recofussing* anggaran, sehingga mengakibatkan terdapatnya beberapa program yang tidak mencapai target kinerja.

Adapun capaian target ini dilaksanakan sepenuhnya oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab pada bidang urusan masing-masing, dimana Bappelitbangda berperan untuk mengkoordinasi dan memonitoring capaian target dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Adapun beberapa target dan realisasi tersebut, beberapa diantaranya adalah yang tersebut pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.6 Gambaran Target dan Realisasi Program Prioritas
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020**

Program		Target	Realisasi
Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup			
Indikator	% Penurunan Jumlah Beban (Pencemaran)	41	90,6
Program Penataan Hutan dan Pemanfaatan Hutan			
Indikator	Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (Ton)	339,6	6.346,15
	% Luas Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi yang dipertahankan fungsi dan kepastian hukunya (%)	64,67	67,05
Program Hilirisasi Perikanan			
Indikator	Nilai Hilirisasi Produksi Perikanan	Rp.19.793.772.9 94.810	Rp.23.324.967.9 66.523
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor			
Indikator	Nilai ekspor bersih	135.809.784	135.809.784

Program		Target	Realisasi
	perdagangan (Juta \$ US)		
	Nilai Total Ekspor (Rp. Milyar)	1.358.097.840	1.358.097.840
Program Upaya Kesehatan dan Standarisasi Pelayanan Kesehatan			
Indikator	% puskesmas yang menyelenggarakan program kesehatan tradisional	35	36
	% RS yang terakreditasi nasional	75	88
	% Puskesmas terakreditasi	70	99
Program Pengembangan Baruga Layanan Publik			
Indikator	% Pemanfaatan Baruga Layanan Masyarakat Secara Elektronik	100	100
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan			
Indikator	Cakupan Luas Lahan yang kritis yang direhabilitasi (Ha)	100	510
	Indeks Kualitas tutupan Lahan (Ha)	58,42	54,94
	% Luas Kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang dipertahankan	64,67	67,05

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2020

❖ Keterkaitan dengan capaian Akhir Renstra 2023

Melihat dari keterkaitan dari target dan capaian akhir Renstra terkait capaian indikator ke-1 maka dapat dilihat bahwasanya Tahun Kedua Renstra telah mencapai target yang ingin diraih yaitu sebesar 100%. Besar upaya Bappelitbangda untuk mempertahankan capaian kinerja terhadap target Renstra 2023.

Adapun untuk capaian indicator ke-2 dan ke-3 yaitu tidak mencapai target yang ingin diraih, dikarenakan terjadinya beberapa perubahan kebijakan dimana salah satunya penggabungan Perangkat Daerah dan efek pandemi

covid 19 sehingga target dari kedua indikator tersebut tidak tercapai. Adapun hal tersebut akan ditindaklanjuti pada perubahan RPJMD 2018-2023 Provinsi Sulawesi Selatan yang dalam tahap penyusunan.

❖ **Anggaran yang mendukung Sasaran dan Tingkat Efisiensinya**

Sesuai penjabaran pada bab sebelumnya bahwa indikator Sasaran pertama ini didukung oleh **Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan** yang terdapat di Bidang Perencanaan Makro, Pembiayaan Dan Kerjasama Wilayah.

Sasaran	Program/ Kegiatan
Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas)
	a. Penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
	b. Penyusunan Dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Selatan
	c. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-planning)
	d. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
	e. Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	f. Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
	g. Fasilitasi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan

Adapun alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator sasaran ini dijabarkan dalam table 3.7 sebagai berikut :

Tabel 3.7 Capaian Anggaran Sasaran ke-1

Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi	Rp. 8.779.439.223	Rp. 8.639.264.451	98,41%

Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
pembangunan daerah			

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2020

Dari kedua tabel di atas didapatkan bahwa realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp. 8.639.264.451,- atau 98,41% dari target dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 98%. Dikarenakan pandemi covid 19 dan peleburan perangkat daerah mengakibatkan capaian kinerja rendah, namun anggaran yang dikelola pada sasaran ini harus dimanfaatkan secara maksimal, sehingga mengakitnya efisiensi anggaran 0, seperti yang digambarkan pada tabel 3.8

Tabel 3.8 Tingkat efisiensi sasaran ke-I

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	98%	98,41%	0%

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2020

Faktor yang mempengaruhi realisasi indikator sasaran tersebut adalah:

a. Pendukung :

- Kualitas SDM yang memadai, memiliki komitmen dan motivasi untuk melakukan tugas dan fungsi secara maksimal.
- Komitmen pimpinan/ para pemangku kebijakan di daerah terhadap program.
- Mengembangkan peran *e-planning* guna menjadi system yang dapat menjadi instrument pendukung untuk meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah.
- Telah terintegrasi *system* perencanaan, anggaran dan evaluasi pembangunan daerah.
- Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP).

b. Permasalahan :

- Terjadinya *recofussing* anggaran sebagai dampak dari penanganan pandemic covid 19, sehingga alokasi dana untuk pembangunan tidak maksimal.
- Perubahan Peraturan di tingkat pusat sehingga memerlukan beberapa penyesuaian.
- Keterlambatan OPD/ Unit Kerja dalam menyusun dan melakukan penginputan Evaluasi Rencana Kerja (Renja) yang mana pada Evaluasi Renja tersebut memuat capaian setiap Program (*Outcome*).
- Terlambatnya pengesahan anggaran OPD dan revisi anggaran.
- Belum adanya komitmen yang kuat bagi pelaksana kegiatan, utamanya pada bidang teknis untuk melaksanakan kegiatan berorientasi hasil yang berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan serta tidak berpedoman pada jadwal yang telah disusun.
- Pengendalian dan evaluasi yang dilakukan setiap triwulan belum sesuai seperti yang diharapkan.

Solusi :

- Komitmen yang tegas dalam pelaksanaan evaluasi Renja dan Renstra yang sesuai ketentuan, utamanya pada jadwal dan kualitas laporan yang disampaikan (setiap triwulan).
- Membuat jadwal pra penyusunan Evaluasi Renja selambat-lambatnya 3 pekan pertama, bulan pertama tahun berikutnya agar data dapat kinerja segera tersedia.
- Meningkatkan evaluasi program dan kegiatan yang capaian kinerjanya rendah.
- Perlu perbaikan dokumen perencanaan dalam pencapaian target kinerja program yang akan direncanakan.

3.2.2. Pengukuran Capaian Sasaran ke – 2

Telah disebutkan diatas bahwasanya sasaran ke -2 mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja. Sasaran ke – 2 ini menjadi sasaran yang berfokus di Sekretariat

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
Sasaran ke 2, dengan indikatornya adalah sebagai berikut :

Sasaran	: Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Indikator	: 1. Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan) 2. Nilai SAKIP OPD 3. % ASN Nilai SKP kategori Baik

Target dan realisasi kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut:

Tabel 3.9 Target dan realisasi kinerja sasaran ke-2

No	Indikator	Baseline 2019	2020			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2023 (%)
			Target %	Realisasi %	Capaian %		
1.	Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	103%	94	99,1	$(99,1/94) \times 100\% = 101\%$	97	104
2.	Nilai Sakip OPD	90%	80	80	$(80/80) \times 100\% = 100\%$	90	113
3.	% ASN Nilai SKP Kategori Baik	100	100	100	$(100/100) \times 100\% = 100\%$	100	100
4.	% Temuan Material	n/a	0,06	0,06	$(0,06/0,06) \times 100\% = 100\%$	0,05	120
Rata-rata Capaian Kinerja					100,25		

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2020

❖ **Penjelasan Target, realisasi dan Capaian Indikator Sasaran**

- Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran ke-2 dengan indikator kinerja sasaran yaitu **rata-rata capaian kinerja perangkat daerah (evaluasi dokumen perencanaan)** sebesar **100%**.

Berdasarkan Laporan Evaluasi Rencana Kerja Bappeda Tahun 2020, capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah sebesar 99,1% dan melebihi dari target yang telah ditetapkan. Adapun rincian capaian kinerja pada masing-masing program yang terdapat di Bappelitbangda Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

- a.1a Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas), dengan capaian kinerja sebesar **100%**.
- a.1b Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru (Prioritas), dengan capaian kinerja sebesar **100%**.
- a.1c Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dengan capaian kinerja sebesar **100%**.
- a.1d Program Perencanaan Perekonomian, dengan capaian kinerja sebesar **100%**.
- a.1e Program Perencanaan Sumberdaya Alam, dengan capaian kinerja sebesar **100%**.
- a.1f Program Perencanaan Infrastruktur dan kewilayahan, dengan capaian kinerja sebesar **100%**.
- a.1g Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan capaian kinerja sebesar **100%**.
- a.1h Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan capaian kinerja sebesar **100%**.
- a.1i Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja, dengan capaian kinerja sebesar **100%**.
- a.1j Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, dengan capaian kinerja sebesar **100%**.
- a.1k Program Pengembangan dan Implementasi Inovasi Pemerintahan, dengan capaian kinerja sebesar **100%**.
- a.1l Program Kelitbang dan Pemanfaatan IPTEK Daerah dengan capaian kinerja sebesar **89%**. Program ini tidak mencapai target disebabkan Kajian Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap

Kinerja Pembangunan Sulawesi Selatan jangka waktunya pada Tahun 2020 tidak memenuhi syarat untuk dilaksanakannya penelitian tersebut sehingga dialihkan pelaksanaannya Tahun 2021 dan anggarannya ditambahkan pada Tahun 2021.

- Sampai dengan saat ini, hasil realisasi kinerja sasaran ke-2, dengan indikator kinerja **Nilai Sakip OPD** belum dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2020, karena pelaksanaan evaluasi SAKIP Tahun 2020 belum dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun target yang ingin dicapai tahun 2020 adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mendapat nilai 80% atau **kategori BB** dengan capaian kinerja 100 %.
- Tabel 3.9 menunjukkan realisasi kinerja sasaran ke-2, indikator kinerja **% ASN Nilai SKP Kategori Baik** sebesar **100%**. Adapun mayoritas nilai SKP pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berkategori baik, dengan nilai terendah sebesar 82,91.
- Sampai dengan saat ini, hasil realisasi kinerja sasaran ke-2, dengan indikator kinerja **Persentase Temuan Material** belum dapat disampaikan dalam Laporan Kinerja Tahun 2020. Dikarenakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 094/0775/A.1/Itprov bahwasanya pada tanggal 23 s.d 26 Februari 2020 untuk melakukan reviu atas Laporan keuangan Perangkat Daerah, sehingga hasil dari reviu tersebut belum didapatkan. Adapun target yang ingin dicapai tahun 2020 adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah pada review Inspektorat sebesar-besarnya persentase temuan material tersebut adalah **0,06** dengan capaian kinerja 100 %.

❖ Keterkaitan dengan capaian Akhir Renstra 2023

Melihat dari keterkaitan dari target dan capaian akhir Renstra, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pada Sasaran ke-2 Indikator 1 yaitu **Rata-rata Capaian kinerja Perangkat Daerah (evaluasi dokumen perencanaan)**, maka dapat dilihat bahwasanya Realisasi tahun kedua Renstra sebesar 99,1% dengan capaian 101%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra yang sebesar 97%, maka besar upaya kinerja Bappelitbangda untuk mempertahankan capaian kinerja ini.
- b. Pada Sasaran ke-2, Indikator 2 yaitu **Nilai Sakip OPD**, maka dapat dilihat bahwasanya Realisasi tahun kedua Renstra sebesar 80 atau kategori **BB** dengan capaian 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra yang sebesar 90, maka diharapkan pada tahun terakhir Renstra target tersebut dapat diraih.
- c. Pada Sasaran ke-2, Indikator 3 yaitu **% ASN Nilai SKP Kategori Baik**, maka dapat dilihat bahwasanya Tahun kedua Renstra telah mencapai target yang diinginkan diraih yaitu sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra yang sebesar 100, besar upaya Bappelitbangda untuk mempertahankan capaian kinerja terhadap target Renstra.
- d. Pada Sasaran ke-2, Indikator 4 yaitu **% Temuan Material**, maka dapat dilihat bahwasanya Realisasi tahun kedua Renstra sebesar 0,06 dengan capaian 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra yang sebesar 0,05, maka diharapkan pada tahun terakhir Renstra target tersebut dapat diraih.

❖ Anggaran yang mendukung Sasaran dan Tingkat Efisiensinya

Sesuai penjabaran pada bab sebelumnya bahwa indikator Sasaran kedua ini didukung oleh **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Perencanaan, Penanganan dan Evaluasi Kinerja, dan Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.**

Sasaran	Program/ Kegiatan
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Program Pelayanan Administrasi
	a. <i>Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional</i>
	b. <i>Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS</i>
	c. <i>Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan</i>
	d. <i>Penyediaan Makanan dan Minuman</i>
	e. <i>Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah</i>
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	a. <i>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor/ Asrama</i>
	b. <i>Pemeliharaan Rutin/ Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan/ Dinas</i>
	c. <i>Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor</i>
	d. <i>Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor</i>
	3. Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
	a. <i>Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah</i>
	b. <i>Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Keuangan</i>
	4. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	a. <i>Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian</i>
b. <i>Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI beserta Perlengkapannya</i>	

Adapun alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator sasaran ini dijabarkan dalam table 3.10 sebagai berikut :

Tabel 3.10 Capaian Anggaran Sasaran ke-2

Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatnya keselarasan	Rp. 12.586.515.608	Rp. 11.511.361.514	91,5%

Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah			

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2020

Dari kedua tabel di atas didapatkan bahwa realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.11.511.361.514,- atau 91,5% dari target dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,25%. Adapun dikarenakan terjadinya efisiensi belanja terutamanya pada pada rekening belanja perjalanan dinas, mengakibatkan realisasi anggaran tidak mencapai 100%. Dengan demikian, tingkat efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 8,75% seperti yang digambarkan pada tabel 3.11.

Tabel 3.11 Tingkat efisiensi sasaran ke-2

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	101		
	100		
	100		
	100		
Rata-rata Capaian Kinerja	100,25	91,5	8,75

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2020

Faktor yang mempengaruhi realisasi indikator sasaran tersebut adalah:

a. Pendukung

- Koordinasi dan Kerjasama yang baik dalam lingkup kerja Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan.
- Tersedianya sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
- Komitmen pimpinan dalam pencapaian kinerja.

b. Permasalahan

- Belum meratanya kemampuan, pemahaman, pemanfaatan, pengelolaan dan penerapan teknologi informasi dan manajemen yang berbasis kinerja.

- Mekanisme pencairan anggaran dan proses pengadaan barang/jasa yang baru sangat perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif.
- Kualitas SDM yang kurang memadai.

Solusi

- Peran aktif pejabat struktural dalam mengawal program dan kegiatan, baik dari kinerja maupun anggaran.
- Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang mengalami efisiensi anggaran. Pelaksanaan kegiatan rutin dalam hal pemeliharaan, pengadaan serta yang sifatnya pelayanan dilakukan pengukuran yang lebih terukur dengan pencapaian target kerja yang akan dicapai.
- Peningkatan kualitas SDM
- Terus meningkatkan kualitas dokumen SAKIP dalam rangka pencapaian sasaran yang berorientasi hasil.

3.2.3. Pengukuran Capaian Sasaran ke – 3

Telah disebutkan diatas bahwasanya sasaran ke -3 mempunyai 1 (satu) indikator kinerja. Sasaran ke – 3 ini menjadi sasaran yang berfokus di Bidang Ekonomi, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, dan Bidang Infrastruktur, Sumberdaya dan Pengembangan Wilayah. Sasaran ke 3, dengan indikatornya adalah sebagai berikut :

Sasaran : Terintegrasinya implementasi kebijakan nasional
 Indikator : Prosentase kesesuaian prioritas pembangunan

Target dan realisasi kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel 3.13 berikut:

Tabel 3.12 Target dan realisasi kinerja sasaran ke-3

No	Indikator	Baseline 2019	2020			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 20120 terhadap target 2023 (%)
			Target %	Realisasi %	Capaian %		
1.	Terintegrasinya implementasi kebijakan nasional	100	100	100	$(100/100) \times 100\% = 100\%$	100	100

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2020

❖ *Penjelasan Target, realisasi dan Capaian Indikator Sasaran*

Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran ke-3 dengan terintegrasinya implementasi kebijakan nasional sebesar **100%**.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 terdapat 5 (lima) prioritas pembangunan nasional 2020 dan 5 (lima) prioritas pembangunan daerah 2020, yaitu :

Tabel 3.13 Integrasi antara Prioritas Nasional dengan Daerah

No	Prioritas Nasional RKP 2020	Prioritas Sulawesi Selatan 2020	Ket
1	Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan	Peningkatan kualitas SDM dan Penurunan Angka Kemiskinan	- Pembangunan SDM meliputi: sektor pendidikan, kesehatan, Kualitas ASN, - Penurunan Angka Kemiskinan
2	Penguatan Konektivitas dan Pemerataan	Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur wilayah	Peningkatan kualitas infrastruktur Darat, laut, udara, dan pembukaan daerah terisolir,
3	Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Kesempatan Kerja	Akselerasi hilirisasi produk berbasis sumber daya alam, peningkatan Pusat Pertumbuhan baru, dan pengembangan destinasi pariwisata	- Hilirisasi pengelolaan produk berbasis sumber daya alam - Peningkatan Pusat-Pusat Pertumbuhan baru - Pembukaan lapangan kerja baru - Pengembangan destinasi pariwisata
4	Pemantapan Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan	Peningkatan Ketahanan pangan, Sumber daya air,	- Peningkatan Ketahanan pangan, - Sumber daya air,

No	Prioritas Nasional RKP 2020	Prioritas Sulawesi Selatan 2020	Ket
	Pelestarian Lingkungan Hidup	dan pelestarian Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Pelestarian Lingkungan Hidup - Pemenuhan universal acces (100-0-100)/airminum, Kawasan Kumuh, dan sanitasi. - Pemenuhan irigasi pertanian - Penyediaan listrik pada daerah perpendil
5	Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	Peningkatan ketertiban dan keamanan, Reformasi birokrasi, dan Inovasi Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan ketertiban dan kenyamanan masyarakat - Reformasi birokrasi - Pemantapan pelayan satu pintu (mal pelayanan)

Sumber: RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

❖ **Keterkaitan dengan capaian Akhir Renstra 2023**

Melihat dari keterkaitan dari target dan capaian akhir Renstra terkait capaian indikator sasaran ke-3, maka dapat dilihat bahwasanya Tahun kedua Renstra telah mencapai target yang diinginkan diraih yaitu sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra yang sebesar 100, maka Bappelitbangda akan berupaya keras untuk mempertahankan capaian kinerja tersebut.

❖ **Anggaran yang mendukung Sasaran dan Tingkat Efisiensinya**

Sesuai penjabaran pada bab sebelumnya bahwa indikator Sasaran pertama ini didukung oleh **Program Perencanaan Perekonomian, Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dan Program Perencanaan Sumber Daya Alam.**

Sasaran	Program/ Kegiatan
Terintegrasinya Implementasi Kebijakan Nasional	1. Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	a. <i>Penyusunan Rencana Aksi Daerah/ Sustainable Development Goals (SDGs)</i>
	b. <i>Penyusunan Kebijakan/ Program Prioritas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial</i>
	c. <i>Penyusunan Kebijakan/ Program Prioritas Pembangunan Bidang Pemerintahan</i>
	d. <i>Penyusunan Kebijakan/ Program Prioritas Pembangunan Pendidikan dan Olahraga</i>
	2. Program Perencanaan Perekonomian
	a. <i>Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan</i>
	b. <i>Koordinasi Perencanaan Pengembangan Investasi, Penanaman Modal dan PTSP</i>
	c. <i>Koordinasi Pencapaian Indikator Makro</i>
	d. <i>Koordinasi Perencanaan Pengembangan Bidang Koperasi dan UKM</i>
	e. <i>Perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Sektor Kelautan dan Perikanan</i>
	f. <i>Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Tanaman Pangan dan Holtikultura</i>
	3. Program Perencanaan dan Sumber Daya Alam
a. <i>Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup</i>	

Adapun alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator sasaran ini dijabarkan dalam tabel 3.14 sebagai berikut :

Tabel 3.14 Capaian Anggaran Sasaran ke-3

Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
Terintegrasinya implementasi kebijakan nasional	Rp. 3.591.355.546	Rp. 3.278.853.839	91,3%

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2020

Dari kedua tabel di atas didapatkan bahwa realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.3.278.853.839,- atau 91,3% dari target dan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%. Adapun dikarenakan terjadinya efisiensi belanja terutamanya pada pada rekening belanja perjalanan dinas, mengakibatkan realisasi anggaran tidak mencapai 100%. Dengan demikian, tingkat efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 8,7% seperti yang digambarkan pada tabel 3.15.

Tabel 3.15 Tingkat efisiensi sasaran ke-3

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Terintegrasinya implementasi kebijakan nasional	100	91,3	8,7

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2020

Faktor yang mempengaruhi realisasi indikator sasaran tersebut adalah:

a. Pendukung :

- Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan berbagai instansi baik pusat maupun daerah dan stakeholder terkait.
- Kontribusi dan dukungan berbagai pihak di lingkungan internal dalam perwujudan sinergitas pembangunan.

b. Permasalahan :

- Terjadi perubahan-perubahan Kebijakan Nasional dan terdapat tumpang tindih kebijakan antar instansi Kementerian/ Lembaga

Solusi dalam permasalahan yang dihadapi :

- Lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama guna mendorong tercapaian target kinerja program-program pembangunan daerah

3.2.4. Pengukuran Capaian Sasaran ke – 4

Telah disebutkan diatas bahwasanya sasaran ke -4 mempunyai 1 (satu) indikator kinerja. Sasaran ke – 4 ini menjadi sasaran yang berfokus di Bidang Ekonomi dan Bidang Infrastruktur, Sumberdaya dan Pengembangan Wilayah.

Sasaran ke 4, dengan indikatornya adalah sebagai berikut :

Sasaran : Terintegrasinya program pembangunan sektoral dan kewilayahan

Indikator : Prosentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW

Target dan realisasi kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel 3.16 berikut:

Tabel 3.16 Target dan realisasi kinerja sasaran ke-4

No	Indikator	Baseline 2019	2020			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2023 (%)
			Target %	Realisasi %	Capaian %		
1.	Terintegrasinya program pembangunan sektoral dan kewilayahan	100	100	100	$(100/100) \times 100\% = 100\%$	100	100

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2020

❖ **Penjelasan Target, realisasi dan Capaian Indikator Sasaran**

Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran ke-4 dengan terintegrasinya implementasi kebijakan nasional sebesar **100%**.

Terdapat

Sebagai upaya mewujudkan tujuan penataan ruang adalah mensinergikan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 dengan kebijakan penataan ruang daerah sebagaimana ditetapkan dalam RTRWP Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 yang berwujud dalam arah kebijakan pembangunan kewilayahan Provinsi Sulawesi Selatan yang diarahkan pada revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional melalui pengembangan kawasan strategis provinsi serta pengembangan kawasan andalan untuk sektor unggulan antara lain pertanian, industri, dan perikanan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan di Sulawesi Selatan.

Kebijakan pembangunan kewilayahan Provinsi Sulawesi Selatan diwujudkan dalam pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui pelaksanaan

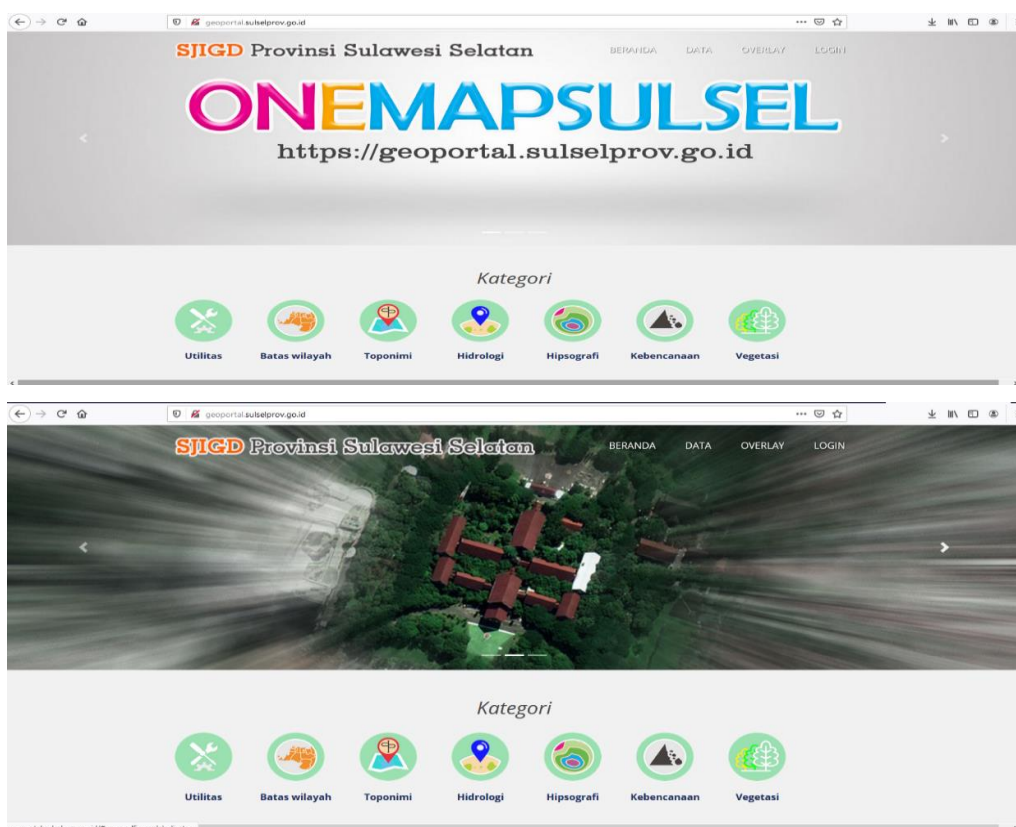
program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya yang termuat di dalam rencana tata ruang wilayah yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu indikasi program utama pemanfaatan ruang. Pelaksanaan pemanfaatan ruang yang termuat dalam rencana tata ruang daerah disinkronisasikan dan disinergikan dengan dokumen perencanaan pembangunan yang merupakan arahan pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Tabel 3.17. Konsistensi RKPD dengan RTRWP

ARAHAN RTRWP		RKPD TAHUN 2020		KESESUAIAN
INDIKASI PROGRAM	LOKASI	PROGRAM	LOKASI	
Peningkatan jalan dan jembatan	Kawasan Makassar DSK; Kawasan Watampone DSK; Kawasan Bulukumba DSK; Kawasan Palopo DSK; Kawasan Parepare DSK	Pembangunan dan peningkatan Jalan dan jembatan	Palopo DSK; Parepare DSK; Watampone DSK; Bulukumba DSK; Makassar DSK	100%
Pengembangan jalur transportasi laut dari dan ke pulau-pulau kecil	Kepulauan Kapoposang dan Takabonerate	Penyelenggaraan Kepelabuhanan dan Angkutan Pelayaran	Pelabuhan Penyeberangan Pamatata Kab. Selayar	100%
Pengembangan kawasan pertanian untuk pertanian hortikultura	Kawasan Makassar DSK; Kawasan Watampone DSK; Kawasan Bulukumba DSK; Kawasan Palopo DSK; Kawasan Parepare DSK		Takalar, Enrekang, Bulukumba, Maros, Sidrap, Tator, Sinjai, Gowa, Luwu, Bone, Pinrang	100%
Pengembangan kawasan komoditas perkebunan	Kawasan Parepare DSK; Kawasan Bulukumba DSK	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Perkebunan	Sinjai, Barru, Bulukumba	100%
Pengembangan kawasan pariwisata	Kawasan Makassar DSK	Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya	Benteng Somba Opu	100%
Pengembangan kawasan perikanan	Kawasan Watampone DSK; Kawasan	Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan	Luwu, Luwu Timur, Bulukumba,	100%

ARAHAN RTRWP		RKPD TAHUN 2020		KESESUAIAN
INDIKASI PROGRAM	LOKASI	PROGRAM	LOKASI	
	Bulukumba DSK; Kawasan Palopo DSK; Kawasan Parepare DSK		Bantaeng, Pinrang, Barru, Jeneponto, Wajo, Pangkep, Luwu Utara	

- ❖ Adapun dalam rangka menunjang dan monitoring pencapaian kinerja ini didukung oleh beberapa instrument teknologi informasi diantaranya adalah Sistem Informasi Geospasial yang berfungsi untuk memberikan informasi spasial daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan secara umum dengan menyesuaikan arah kebijakan Badan Informasi Geospasial. Alamat akses sistem ini adalah :



❖ ***Keterkaitan dengan capaian Akhir Renstra 2023***

Melihat dari keterkaitan dari target dan capaian akhir Renstra terkait capaian indikator sasaran ke-4, maka dapat dilihat bahwasanya Tahun kedua Renstra telah mencapai target yang diinginkan diraih yaitu sebesar 100%. Jika

dibandingkan dengan target akhir Renstra yang sebesar 100, maka Bappelitbangda akan berupaya keras untuk mempertahankan capaian kinerja tersebut.

❖ **Anggaran yang mendukung Sasaran dan Tingkat Efisiensinya**

Sesuai penjabaran pada bab sebelumnya bahwa indikator Sasaran pertama ini didukung oleh **Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru** dan **Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan**.

Sasaran	Program/ Kegiatan
Terintegrasi Program Pembangunan Sektoral dan Kewilayahan	1. Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru
	a. <i>Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang</i>
	b. <i>Koordinasi Perencanaan Pengembangan Ekonomi Baru dan Kawasan Khusus</i>
	2. Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
	a. <i>Koordinasi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan</i>
	b. <i>Koordinasi Pelaksanaan Program IPDMIP</i>
	c. <i>Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah</i>
d. <i>Pengelolaan Jaringan Informasi Geospasial Provinsi</i>	

Adapun alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator sasaran ini dijabarkan dalam table 3.18 sebagai berikut :

Tabel 3.18 Capaian Anggaran Sasaran ke-4

Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
Terintegrasinya program pembangunan sektoral dan kewilayahan	Rp. 7.067.825.271	Rp. 6.349.344.459	89,8%

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2020

Dari kedua tabel di atas didapatkan bahwa realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.6.349.344.459,- atau 89,8% dari target dan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%. Adapun dikarenakan terjadinya efisiensi belanja terutamanya pada pada rekening belanja perjalanan dinas, mengakibatkan realisasi anggaran tidak mencapai 100%. Dengan demikian, tingkat efisiensi dalam penggunaan sumber daya

dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 10,02%. seperti yang digambarkan pada tabel 3.19.

Tabel 3.19 Tingkat efisiensi sasaran ke-4

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Terintegrasinya program pembangunan sektoral dan kewilayahan	100	89,8	10,2

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2020

Faktor yang mempengaruhi realisasi indikator sasaran tersebut adalah:

a. Pendukung :

- Koordinasi yang baik antara Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dengan SKPD terkait guna mendukung konsistensi program pembangunan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah;
- Kontribusi dan dukungan berbagai pihak di lingkungan internal dalam perwujudan sinergitas pembangunan.

b. Permasalahan :

- Sulitnya menerjemahkan kesesuaian bahasa program dalam rencana pembangunan daerah dengan Bahasa/indikasi program pada tata ruang.

Solusi:

- Lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama guna mendorong tercapaian target kinerja program-program pembangunan daerah
- Meningkatkan upaya dalam menerjemahkan kesesuaian program Pembangunan Daerah kedalam Program pada tata ruang pada saat peninjauan ulang.

3.2.5. Pengukuran Capaian Sasaran ke – 5

Telah disebutkan diatas bahwasanya sasaran ke -5 mempunyai 1 (satu) indikator kinerja. Sasaran ke – 5 ini menjadi sasaran yang berfokus di Bidang Penelitian dan Pengembangan. Sasaran ke 5, dengan indikatornya adalah sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengembangan dan implementasi inovasi pemerintahan daerah

Indikator : % Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi daerah

Target dan realisasi kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel 3.20 berikut:

Tabel 3.20 Target dan realisasi kinerja sasaran ke-5

No	Indikator	Baseline 2019	2020			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2023 (%)
			Target %	Realisasi %	Capaian %		
1.	% Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi daerah	155%	20	28	$(28/20) \times 100\% = 140\%$	20%	500

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2020

❖ **Penjelasan Target, realisasi dan Capaian Indikator Sasaran**

Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran ke-5 dengan indikator % Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi daerah sebesar **140%**.

Terdapat 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menghasilkan inovasi pada tahun 2020 dan 1 OPD dimana inovasinya (*HALOCOACH*) terus dilakukan pembaharuan setiap tahunnya sehingga terhitung 11 OPD. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

Tabel 3.21 Daftar Inovasi Perangkat Daerah Pemrov Sulsel

NO	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	DINAS PENANAMAN MODAL & PTSP	NENI SI LINCA (NEw Normal Innovation Sistem Informasi Layanan Izin penelitian oNline CAmpus)	iga2020.provinsi.sulawesi.selatan
2	BADAN PROMOSI PARIWISATA	PALLAWANA (PEMBATAS) : Inovasi Pelayanan Restoran/Rumah Makan Berbasis	iga2020.provinsi.sulawesi.selatan

NO	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI	KETERANGAN
1	2	3	4
		Kearifan Lokal di Sulawesi Selatan	
3	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	“Sulawesi Selatan in Our Hand” atau “South Sulawesi in Our Hand” (SulSel dalam Genggaman) : New Normal Inovasi berbasis aplikasi dan barcode di destinasi wisata	iga2020.provinsi.sulawesi.selatan
4	DINAS PERDAGANGAN	BARUGA PASAR: Protokol Kesehatan Berbasis Teknologi Non Tunai di Pasar Tradisional di Sulawesi Selatan	iga2020.provinsi.sulawesi.selatan
5	DINAS KESEHATAN	WISATA COVID-19	iga2020.provinsi.sulawesi.selatan
6	DINAS KETAHANAN PANGAN	PASAR TANI: Protokol Kesehatan Berbasis Teknologi Non Tunai di Pasar Modern di Sulawesi Selatan	iga2020.provinsi.sulawesi.selatan
7	DINAS PERHUBUNGAN	Penyelenggaraan Transportasi Online di masa New Normal	iga2020.provinsi.sulawesi.selatan
8	RSUD Haji Makassar	SIMEDIS TRENDI (Strategi Pengembangan Manajemen Surveilans Terpadu di RSUD Haji Makassar	Dalam Proses Penilaian proposal oleh Tim KemenPAN RB
9	UPT Pembibitan Ternak Dan Hijauan Pakan Ternak (PT-HPT), Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Povinsi Sulawesi Selatan	“TESENG SAPITA” BERDAYAKAN PETERNAK DI SULAWESI SELATAN	Dalam Proses Penilaian proposal oleh Tim KemenPAN RB
10	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan	SI BALUNG LESTARI SULSEL (Sapi Bali Unggul dan Lestari dari Sulawesi Selatan)	Dalam Proses Penilaian proposal oleh Tim KemenPAN RB

NO	PERANGKAT DAERAH	JUDUL INOVASI	KETERANGAN
1	2	3	4
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	SIGA Online (Sistem Informasi Gender dan Anak Online), Jendela Informasi Gender dan Anak Sulawesi Selatan	Dalam Proses Penilaian proposal oleh Tim KemenPAN RB
12	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Halocoach	Dalam rangka One agency one innovation

❖ ***Keterkaitan dengan capaian Akhir Renstra 2023***

Melihat dari keterkaitan dari target dan capaian akhir Renstra terkait capaian indikator sasaran ke-5, maka dapat dilihat bahwasanya Tahun kedua Renstra telah mencapai target yang diinginkan yaitu sebesar 140%. Jika dibandingkan dengan target akhir Renstra yang sebesar 20%, maka Bappelitbangda akan berupaya keras untuk mempertahankan capaian kinerja tersebut.

❖ ***Anggaran yang mendukung Sasaran dan Tingkat Efisiensinya***

Sesuai penjabaran pada bab sebelumnya bahwa indikator Sasaran kelima ini didukung oleh **Program Pengembangan dan Implementasi Inovasi Pemerintahan.**

Sasaran	Program/ Kegiatan
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengembangan dan implementasi inovasi pemerintahan daerah	1. Program Pengembangan dan Implementasi Inovasi Pemerintahan
	a. Penguatan Kluster Inovasi
	b. Pengembangan Riset pada Stasiun Litbang Teknologi Perikanan dan Kelautan Balitbangda Prov. Sulsel
	c. Laboratorium Inovasi
	d. Revitalisasi Kebun Raya Pucak

Adapun alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator sasaran ini dijabarkan dalam table 3.23 sebagai berikut :

Tabel 3.23 Capaian Anggaran Sasaran ke-5

Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
% Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi daerah	Rp. 871.730.142	Rp. 633.621.211	72,69%

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2020

Dari kedua tabel di atas didapatkan bahwa realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.633.621.211,- atau 72,69% dari target dan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%. Adapun dikarenakan terjadinya efisiensi belanja terutamanya pada pada rekening belanja perjalanan dinas, mengakibatkan realisasi anggaran tidak mencapai 100%. Dengan demikian, tingkat efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 67,31%. seperti yang digambarkan pada tabel 3.24.

Tabel 3.24 Tingkat efisiensi sasaran ke-5

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
% Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi daerah	140	72,69	67,31

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2020

Faktor yang mempengaruhi realisasi indikator sasaran tersebut adalah:

a. Pendukung :

- Koordinasi yang baik antara Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan dengan SKPD terkait guna meningkatkan inovasi Perangkat Daerah guna mendukung pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan.
- Kontribusi dan dukungan berbagai pihak di lingkungan internal dalam peningkatan inovasi daerah.
- Adanya kemauan dan kemampuan dari perangkat daerah untuk menghasilkan inovasi

b. Permasalahan :

- Belum adanya database inovasi daerah lingkup OPD Prov. Sulsel,
- Belum terdapatnya wali inovasi di setiap OPD.

- Belum maksimalnya respon dari pimpinan perangkat daerah dalam inovasi perangkat daerah.

Solusi :

- Membuat sistem data base inovasi daerah yang ada di setiap OPD lingkup Pemerintah Prov. Sulsel.
- Sosialisasi terhadap pimpinan perangkat daerah akan pentingnya komitmen dari pimpinan dalam pengembangan inovasi.
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama guna mendorong pengembangan inovasi.

3.2.6. Pengukuran Capaian Sasaran ke – 6

Telah disebutkan diatas bahwasanya sasaran ke -6 mempunyai 1 (satu) indikator kinerja. Sasaran ke – 6 ini menjadi sasaran yang berfokus di Bidang Penelitian dan Pengembangan. Sasaran ke 6, dengan indikatornya adalah sebagai berikut :

Sasaran	: Tersedianya bahan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan termanfaatkannya hasil kelitbangan untuk kesejahteraan masyarakat
Indikator	: Jumlah kebijakan hasil kelitbangan dan pemanfaatan iptek daerah

Target dan realisasi kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel 3.25 berikut:

Tabel 3.25 Target dan realisasi kinerja sasaran ke-6

No	Indikator	Baseline 2019	2020			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian s/d 2020 terhadap target 2023 (%)
			Target	Realisasi	Capaian %		
1.	Jumlah kebijakan hasil kelitbangan dan pemanfaatan iptek daerah	100	9 Reko mendasi	10 rekomen dasi	$(10/9) \times 100\% = 111\%$	9	111

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2020

❖ Penjelasan Target, realisasi dan Capaian Indikator Sasaran

Tabel diatas menunjukkan realisasi kinerja sasaran ke-6 dengan indikator Jumlah kebijakan hasil kelitbangan dan pemanfaatan iptek daerah sebesar **112%**.

Terdapat 10 rekomendasi yang dihasilkan guna mendukung pembangunan di Sulawesi Selatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi terkait kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public khususnya pelayanan non perizinan dan perizinan pada PTSP;
2. Rekomendasi terkait analisis hasil pemetaan program berdasarkan Permendagri Nomor 9 Tahun 2019 dalam menunjang program prioritas pemerintah Prov. Sulsel;
3. Rekomendasi terkait isu strategis mikro plastic;
4. Rekomendasi terkait deteksi dini efek pencemaran plastik dengan menggunakan embrio ikan Endemik Sulawesi *Oryzias Celebensis* untuk analisis resiko ekologis;
5. Rekomendasi pemanfaatan gas alam sebagai sumber energi dan bahan baku industri petrokimia (Pabrik Amoniak dan Urea)
6. Rekomendasi terkait agroforestry berbasis tanaman unggulan Prov. Sulawesi Selatan dalam areal KPH untuk menunjang ketahanan pangan masyarakat;
7. Rekomendasi terkait adaptasi bibit unggul dan deteksi molekuler pada alat sutera
8. Rekomendasi terkait pengembangan murbei unggul untuk peningkatan kualitas kokon ulat sutera.
9. Rekomendasi terkait budidaya udang windu di pesisir pantai Sulsel.
10. Rekomendasi terkait pemilihan induk dan benur berkualitas untuk mengembalikan kejayaan udang windu di Sulsel.

❖ Keterkaitan dengan capaian Akhir Renstra 2023

Melihat dari keterkaitan dari target dan capaian akhir Renstra terkait capaian indikator sasaran ke-6, maka dapat dilihat bahwasanya Tahun kedua Renstra telah mencapai target yang ingin diraih. Jika dibandingkan dengan

target akhir Renstra yang sebesar 9 rekomendasi, maka Bappelitbangda akan berupaya keras untuk mempertahankan capaian kinerja tersebut.

❖ **Anggaran yang mendukung Sasaran dan Tingkat Efisiensinya**

Sesuai penjabaran pada bab sebelumnya bahwa indikator Sasaran pertama ini didukung oleh **Program Kelitbangan dan Pemanfaatan IPTEK Daerah.**

Sasaran	Program/ Kegiatan
Tersedianya bahan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan termanfaatkannya hasil kelitbangan untuk kesejahteraan masyarakat	1. Program Kelitbangan dan Pemanfaatan IPTEK Daerah
	a. <i>Pemeliharaan Benih Eksplorasi dan Tanaman Koleksi</i>
	b. <i>Eksplorasi Tumbuhan Sulawesi</i>
	c. <i>Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan</i>
	d. <i>Pengembangan Kebijakan dan Isu-isu Strategis Sektor Pmerintahan</i>
e. <i>Peningkatan Kualitas Kelitbangan Utama</i>	

Adapun alokasi dan realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian indikator sasaran ini dijabarkan dalam table 3.26 sebagai berikut :

Tabel 3.26 Capaian Anggaran Sasaran ke-6

Sasaran Strategis	Alokasi Anggaran	Realisasi	Capaian
Tersedianya bahan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan termanfaatkannya hasil kelitbangan untuk kesejahteraan masyarakat	Rp. 2.894.818.300	Rp. 2.016.532.965	69,66%

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2020

Dari kedua tabel di atas didapatkan bahwa realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut sebesar Rp.2.016.532.965,- atau 69,66% dari target dan dengan capaian kinerja sasaran sebesar 100%. Adapun dikarenakan terjadinya efisiensi belanja terutamanya pada pada rekening

belanja perjalanan dinas serta kondisi pandemi covid 19 yang terjadi sehingga beberapa anggaran tidak bias dicairkan, mengakibatkan realisasi anggaran tidak mencapai 100%. Dengan demikian, tingkat efisiensi dalam penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut sebesar 41,34%. seperti yang digambarkan pada tabel 3.27.

Tabel 3.27 Tingkat efisiensi sasaran ke-6

Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Terintegrasinya program pembangunan sektoral dan kewilayahan	111	69,66	41.34

Sumber : Bappelitbangda prov. Sulsel, 2020

Faktor yang mempengaruhi realisasi indikator sasaran tersebut adalah:

a. Pendukung :

- Berkembangnya jaringan dan kerjasama kelembagaan litbang dengan adanya Forum Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah (FPPID) sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 25 Tahun 2011.
- Dukungan dan kerjasama yang baik dalam lingkup internal Bappelitbangda.

b. Permasalahan :

- Belum tersedianya data base kelitbang yang akurat dan up to date untuk mendukung kebutuhan data dan informasi yang cepat dan akurat guna kepentingan kelitbang dalam menindaklanjuti isu-isu actual dan strategis.

Solusi dalam permasalahan yang dihadapi :

- Membuat data base terkait kelitbang dengan menyesuaikan dari isu actual dan strategis yang terjadi dewasa ini.
- Lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama guna mendorong tercapaian target kinerja program-program pembangunan daerah.

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran menjadi faktor pendukung dan berpengaruh dalam rangka mencapai indikator keberhasilan. Program dan kegiatan juga dapat dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang memadai. Di dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan target belanja setelah perubahan sebesar Rp.67.291.548.453,- dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 3.28 Target Belanja Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan APBD Perubahan Parsial Tahun Anggaran 2020

No.	Uraian	Target	Prosentase
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 31.549.864.363,-	47%
1.1	Belanja Pegawai	Rp. 31.549.864.363,-	100%
2.	Belanja Langsung	Rp. 35.741.684.090,-	53%
2.1	Belanja Pegawai	Rp. 229.217.000,-	1%
2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 33.118.212.390,-	93%
2.3	Belanja Modal	Rp. 2.394.254.700,-	7%
JUMLAH		Rp. 67.291.548.453,-	100%

Sumber : Bappelitbangda Prov. Sulsel Tahun 2020

Adapun sumber pembiayaan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.29. Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2020

No	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	Realisasi (%)
					Keu
1	2	3	4	5 (3-4)	6
	BELANJA DAERAH	67,291,548,453.00	62,419,289,073.00	4,872,259,380.00	92.76
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	31,549,864,363.00	29,990,310,634.00	1,559,553,729.00	95.06
	Belanja Gaji & Tunjangan	13,431,796,067.80	13,431,525,761.00	270,306.80	100.00
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	18,118,068,295.20	16,558,784,873.00	1,559,283,422.20	91.39
II	BELANJA LANGSUNG	35,741,684,090.00	32,428,978,439.00	3,312,705,651.00	90.73
1	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN	8,779,439,223	8,639,264,451	140,174,772	98.40

No	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	Realisasi (%)
					Keu
	EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH (PRIORITAS)				
1	Penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023	1,343,516,450	1,333,642,500	9,873,950	99.27
2	Penyusunan Dokumen RKPD Provinsi Sulawesi Selatan	464,765,768	464,443,482	322,286	99.93
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (e-Planning)	50,000,000	50,000,000	-	100.00
4	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)	124,215,800	109,005,600	15,210,200	87.76
5	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	492,480,300	487,209,453	5,270,847	98.93
6	Sinergitas Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan	414,267,913	404,143,413	10,124,500	97.56
7	Fasilitasi Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan	5,890,192,992	5,790,820,003	99,372,989	98.31
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN BARU (PRIORITAS)	1,505,175,271	916,431,659	588,743,612	60.89
1	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	1,116,980,000	645,567,665	471,412,335	57.80
2	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Ekonomi Baru dan Kawasan Khusus	388,195,271	270,863,994	117,331,277	69.78
3	PROGRAM PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	970,469,705	925,007,597	45,462,108	95.32

No	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	Realisasi (%)
					Keu
1	Penyusunan Rencana Aksi Daerah / Sustainable Development Goals (SDGs)	277,783,197	264,568,694	13,214,503	95.24
2	Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	218,127,808	211,489,099	6,638,709	96.96
3	Penyusunan Kebijakan/Program Prioritas Pembangunan Bidang Pemerintahan	261,941,200	251,509,943	10,431,257	96.02
4	Penyusunan Kebijakan / Program Prioritas Pembangunan Pendidikan dan Olahraga	212,617,500	197,439,861	15,177,639	92.86
4	PROGRAM PERENCANAAN PEREKONOMIAN	2,271,236,112	2,124,084,112	147,152,000	93.52
1	Koordinasi Perencanaan Penanggulangan Kemiskinan	678,659,500	671,594,916	7,064,584	98.96
2	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Investasi, Penanaman Modal dan PTSP	193,071,052	189,079,563	3,991,489	97.93
3	Koordinasi Pencapaian Indikator Makro	742,872,543	615,661,900	127,210,643	82.88
4	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Bidang Koperasi dan UKM	183,409,201	181,094,101	2,315,100	98.74
5	Perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Sektor Kelautan dan Perikanan	211,872,091	209,323,462	2,548,629	98.80
6	Koordinasi Perencanaan Pengembangan dan Pengendalian Tanaman Pangan dan Hortikultura	261,351,725	257,330,170	4,021,555	98.46
5	PROGRAM PERENCANAAN SUMBER DAYA ALAM	349,649,729	229,762,130	119,887,599	65.71
1	Koordinasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup	349,649,729	229,762,130	119,887,599	65.71

No	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	Realisasi (%)
					Keu
6	PROGRAM PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	5,562,650,000	5,432,912,800	129,737,200	97.67
1	Koordinasi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	231,250,000	149,997,200	81,252,800	64.86
2	Koordinasi Pelaksanaan Program IPDMIP	4,600,000,000	4,599,149,700	850,300	99.98
3	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah	460,000,000	425,227,300	34,772,700	92.44
4	Pengelolaan Jaringan Informasi Geospasial Provinsi	271,400,000	258,538,600	12,861,400	95.26
7	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	7,918,673,908	7,591,636,123	327,037,785	95.87
1	Penyediaan Jasa Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	43,450,000	28,373,860	15,076,140	65.30
2	Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS	4,411,632,600	4,339,187,000	72,445,600	98.36
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Pengadaan	308,247,200	307,499,053	748,147	99.76
4	Penyediaan Makanan dan Minuman	1,877,150,000	1,648,755,900	228,394,100	87.83
5	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	1,278,194,108	1,267,820,310	10,373,798	99.19
8	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	3,329,913,700	2,850,925,152	478,988,548	85.62
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Asrama	1,651,975,000	1,401,632,552	250,342,448	84.85
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala dan Penggantian Suku Cadang Kendaraan Jabatan / Dinas	463,209,000	462,309,700	899,300	99.81
3	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	942,229,700	715,697,900	226,531,800	75.96
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan Kantor	272,500,000	271,285,000	1,215,000	99.55

No	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	Realisasi (%)
					Keu
9	PROGRAM PENINGKATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA	931,702,000	885,307,339	46,394,661	95.02
1	Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	630,716,200	591,138,539	39,577,661	93.72
2	Penyusunan dan Pengelolaan Adminstrasi Keuangan	300,985,800	294,168,800	6,817,000	97.74
10	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	356,226,000	183,492,900	172,733,100	51.51
1	Penyusunan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	197,496,000	183,492,900	14,003,100	92.91
2	Pengadaan Pakaian Dinas dan Pakaian KORPRI Beserta Perlengkapannya	158,730,000	-	158,730,000	0.00
11	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN IMPLEMENTASI INOVASI PEMERINTAHAN (PRIORITAS)	871,730,142	633,621,211	238,108,931	72.69
1	Penguatan Kluster Inovasi	104,100,000	103,237,992	862,008	99.17
2	Pengembangan Riset pada Stasiun Litbang Teknologi Perikanan dan Kelautan Balitbangda Prov. Sulsel	514,750,142	279,461,503	235,288,639	54.29
3	Laboratorium Inovasi	163,350,000	161,939,716	1,410,284	99.14
4	Revitalisasi Kebun Raya Pucak	89,530,000	88,982,000	548,000	99.39
12	PROGRAM KELITBANGAN DAN PEMANFAATAN IPTEK DAERAH	2,894,818,300	2,016,532,965	878,285,335	69.66
1	Pemeliharaan Benih Eksplorasi dan Tanaman Koleksi	18,075,000	18,075,000	-	100.00
2	Eksplorasi Tumbuhan Sulawesi	9,570,000	9,570,000	-	100.00

No	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN	Realisasi (%)
					Keu
3	Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan	96,500,000	83,500,000	13,000,000	86.53
4	Pengembangan Kebijakan dan Isu-Isu Strategis Sektor Pemerintahan	2,572,423,300	1,709,577,965	862,845,335	66.46
5	Peningkatan Kualitas Kelitbangan Utama	198,250,000	195,810,000	2,440,000	98.77

Sumber : Bappelitbangda Sulsel 2020

Bab IV berisi
1. Kesimpulan
2. Saran

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 menyampaikan kendala dan upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja pelayanan Bappelitbangda sebagaimana yang telah dijanjikan dalam Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2020 dengan Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat terus ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Bappeda tahun 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 11 (sebelas) indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur ketercapaian 6 (enam) sasaran strategis Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, realisasi kinerja Bappelitbangda Tahun 2020 adalah sebesar 104,18%.
2. Realisasi keuangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 sebesar 92,76%. Dengan rincian Belanja Tidak Langsung sebesar 95,06% dan Belanja Langsung sebesar 90,73%.
3. Berdasarkan data kinerja dan data keuangan Bappelitbangda Tahun 2020, maka terjadi efisiensi anggaran sebesar 11,42%.
4. Secara umum, pencapaian target pada tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh kondisi pandemic covid 19, perubahan kebijakan di tingkat pusat dan perubahan nomenklatur organisasi perangkat daerah di provinsi Sulawesi Selatan. Selain hal

tersebut, ada beberapa tantangan dalam peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi serta penelitian daerah, diantaranya adalah sebagai berikut :

- kurang profesionalnya sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman tentang perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang baik
- ketersediaan data pembangunan yang komprehensif dan kontribusi kegiatan penelitian terhadap pengambilan kebijakan perencanaan

5. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut :

- Guna menunjang pelaksanaan perencanaan dipandang Perlu ditingkatkan pemahaman dan kemampuan teknis aparatur pemerintah daerah terhadap penyusunan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah melalui pelatihan yang berkelanjutan selain karena adanya perubahan peraturan pendukung serta masih banyak laporan yang disampaikan perangkat daerah belum diisi dengan benar.
- Meningkatkan koordinasi internal yang intensif guna terjadi peningkatan kinerja dalam seluruh tingkatan level.

Demikian penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BAPPELITBANGDA Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja dalam penyempurnaan dokumen perencanaan tahun selanjutnya, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan guna mendukung Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan yang lebih maju dan lebih baik.



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telp (0411) 453486 Fax. (0411) 453869
Makassar 90231

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Junaedi B, S.Sos., MH
Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Provinsi Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama :

Nama : PROF. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr
Jabatan : **GUBERNUR SULAWESI SELATAN**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Makassar, November 2020
Pihak Pertama,

Pihak Kedua,



PROF. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr
Gubernur Sulawesi Selatan



JUNAEDI B, S.Sos, MH
Pangkat Pembina
Nip. 19760601 200604 1 017



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
			TUJUAN/SASARAN	
1	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan daerah yang berkualitas dan Bersinergi	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	Prosentase penjabaran konsistensi program RPJMD kedalam RKPd	100%
			Prosentase penjabaran konsistensi program RKPd kedalam APBD	100%
			Prosentase Indikator Program Pembangunan Daerah dengan Tingkat Capaian Hasil (<i>Outcome</i>) minimal 75%	92%
		Terintegrasinya implementasi kebijakan nasional	Prosentase kesesuaian prioritas pembangunan	100%
2	Meningkatkan Sinergitas dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan antar sector dan antar wilayah	Terintegrasinya program pembangunan sektoral dan kewilayahan	Prosentase kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	100%
3	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengembangan dan implementasi inovasi pemerintahan daerah	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pengembangan dan implementasi inovasi pemerintahan daerah	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan Inovasi Daerah	20%
4	Merumuskan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan pemanfaatan hasil kelitbangan untuk kesejahteraan masyarakat	Tersedianya bahan perumusan kebijakan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan termanfaatkannya hasil kelitbangan untuk kesejahteraan masyarakat	Jumlah kebijakan hasil kelitbangan dan pemanfaatan iptek daerah	9 Rekomendasi
5	Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rata-rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah (Evaluasi Dokumen Perencanaan)	94%
			Nilai SAKIP OPD	80%
			% Nilai ASN Kategori Baik	100%
			% Temuan Material	0,06%



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

Program	Anggaran
1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Prioritas)	Rp. 8.779.439.223
2 Program Pengembangan Pusat Pertumbuhan Baru (Prioritas)	Rp. 1.505.175.271
3 Program Pengembangan dan Implementasi Inovasi Pemerintahan (Prioritas)	Rp. 871.730.142
4 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Rp. 970.469.705
5 Program Perencanaan Perekonomian	Rp. 2.119.386.112
6 Program Perencanaan Sumberdaya Alam	Rp. 349.649.729
7 Program Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	Rp. 5.562.650.000
8 Program Kelitbangan dan Pemanfaatan Iptek Daerah	Rp. 2.894.818.300
9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 7.918.673.908
10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp. 3.379.913.700
11 Program Peningkatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	Rp. 931.702.000
12 Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 356.226.000

Pihak Kedua,



PROF. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr
Gubernur Sulawesi Selatan

Pihak Pertama,



JUNAEDI B, S.Sos, MH
Pangkat Pembina
Nip. 19760601 200604 1 017



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*

LEMBAR ASISTENSI

No.	Keterangan
1.	Perbaiki Bab II - Program & Kegiatan dipindahkan ke Bab III
2.	- Realisasi keuangan disatukan di Bab III
3.	

Makassar, 29 Februari 2024

(.....
SURIANI ARAS
.....)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)

Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Telp. (0411) 453486, Fax 453869,
Makassar 90231

Makassar, 23 Juni 2020

Kepada
Yth. Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor : 414.14 / 3323 / Bappelitbangda
Lamp : 5 (lima) berkas
Perihal : Tindak Lanjut Evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019

di –
T e m p a t

Menindaklanjuti Surat Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 700.04/5264/A.1/Itdaprov tanggal 19 Juni 2020, maka berikut disampaikan Penjelasan Tindak Lanjut Pokok-Pokok Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) OPD Tahun 2019 sebagai berikut :

No	Catatan Evaluasi	Tindak Lanjut
a.	Tujuan yang termuat dalam Renstra 2018 – 2023 tidak disertai indikator target keberhasilan	Rumusan indikator tujuan telah termuat dalam Renstra 2018-2023
	Rekomendasi : Merumuskan dan menetapkan indikator tujuan yang termuat dalam Renstra 2018-2023	
b.	Masih terdapat beberapa indikator program dan kegiatan yang ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) belum memenuhi kriteria keberhasilan yang baik	Dalam Perumusan Renstra Perubahan Bappelitbangda Tahun 2018-2023 akan lebih memperhatikan dalam penentuan seluruh ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) dari program dan kegiatan agar seluruhnya dapat memenuhi kriteria
	Rekomendasi : Merumuskan dan menetapkan indikator program dan kegiatan	

No	Catatan Evaluasi	Tindak Lanjut
	yang tertuang dalam Renstra 2018-2023	keberhasilan yang baik.
c.	<p>Merumuskan IKU berdasarkan perubahan atas kelembagaan</p> <p>Rekomendasi : Merumuskan dan menetapkan IKU berdasarkan perubahan kelembagaan Bappelitbangda dengan mengakomodir urusan Balitbangda</p>	IKU BAPPELITBANGDA tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan mengakomodir urusan perencanaan dan litbang.
d.	<p>Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pemberian <i>Reward</i> dan <i>Punishment</i></p> <p>Rekomendasi : Memanfaatkan hasil pengukuran sebagai dasar pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i>.</p>	Akan berupaya untuk memanfaatkan pengukuran capaian kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas agar dimanfaatkan sebagai dasar pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> .
e.	<p>Rencana Aksi Tahun 2020 belum disusun dengan mengurai target kinerja berupa aksi yang akan dilaksanakan</p> <p>Perlu penyampaian rencana aksi dengan menetapkan aksi yang akan dilaksanakan</p>	Rencana Aksi Tahun 2020 telah disusun dengan mengikutsertakan aksi yang akan dilaksanakan dan penentuan target waktu pelaksanaan.
f.	<p>Belum terdapat pengukuran atas realisasi rencana aksi tahun 2020 untuk triwulan I</p> <p>Rekomendasi : Menyusun realisasi rencana aksi</p>	Realisasi Rencana Aksi Triwulan I telah tersusun dan disahkan.

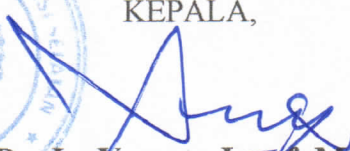
No	Catatan Evaluasi	Tindak Lanjut
	tahun 2020 untuk triwulan I	
g.	<p>Laporan Kinerja Tahun 2019 khususnya pada Bab III Akuntabilitas Kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi mengenai permasalahan yang dihadapi serta upaya perbaikan yang akan dilakukan untuk pencapaian target kinerja ke depan</p> <p>Rekomendasi : Melengkapi LKIP 2019 khususnya Bab III terkait dengan teknis permasalahan yang dihadapi dan upaya perbaikannya serta upaya yang akan dilakukan untuk pencapaian target kinerja dimasa akan datang</p>	LKIP Bappeda, pada Bab III telah memasukan permasalahan teknis yang dihadapi dengan lebih mendalam dan memberikan solusi/ upaya-upaya yang akan dilakukan dalam pencapaian target kinerja dimasa yang akan datang.
h.	<p>Informasi kinerja yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam perbaikan perencanaan</p> <p>Rekomendasi : Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja dalam perbaikan perencanaan ke depan</p>	Hasil evaluasi kinerja dimanfaatkan sebagai upaya dalam perbaikan perencanaan ke depan.
i.	<p>Berdasarkan pengukuran kinerja atas capaian kinerja tahun 2019 masih terdapat capaian kinerja output kegiatan yang belum memenuhi target dari yang ditetapkan.</p> <p>Rekomendasi : Melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja output kegiatan</p>	Akan lebih meningkatkan evaluasi dalam pencapaian kinerja output kegiatan yang belum tercapai dari target yang telah ditetapkan.

No	Catatan Evaluasi	Tindak Lanjut
	yang belum tercapai dari target yang telah ditetapkan.	

Demikian Laporan Hasil Tindak Lanjut Sistem Akuntabilitas Kinerja Bappelitbangda, dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



BAPPELITBANGDA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPALA,


Prof. Dr. Ir. Yusran Jusuf, M.Si., IPU
Pangkat Pembina Utama Madya
NIP. 19691206 199603 1 004